

**Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Risiko Pembiayaan pada
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia**

Tesis



Disusun oleh : Wahyu Isnainianto Hadi

21911063

Program Magister Manajemen

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Risiko Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia” merupakan hasil tulisan pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang digunakan sebagai acuan dengan tata cara yang telah dibenarkan secara ilmiah. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.”

Yogyakarta, 04 Desember 2024



Wahyu Isnainianto Hadi

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta,

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Penguji I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sutrisno', written over a horizontal line.

Prof. Dr. Drs. Sutrisno, MM.

Dosen Penguji II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Abdul Moin', written over a horizontal line.

Abdul Moin, SE., MBA., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

WAHYU ISNAINIANTO HADI

No. Mhs. : 21911063

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Dengan Judul:

ANALISIS PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Prof. Dr. Drs. Sutrisno, MM.

Penguji II



Abdul Moin, SE., MBA., Ph.D.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Manajemen,



Anjar Priyono, SE., M.Si., Ph.D

MOTTO

“Cukuplah Allah menjadi penolong dan Allah adalah sebaik-baik pelindung”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan, pasti akan datang kemudahan”

“Usaha tanpa do'a adalah sombong, do'a tanpa usaha berarti bohong”

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhana Wata'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan juga karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Risiko Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia” dengan baik.

Penulisan tesis ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata-2 di program studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulisan tesis ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan, bimbingan dan juga do'a dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Anjar Priyono, S.E., M.Si., Ph.D selaku ketua Jurusan Manajemen Program Magister Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Sutrisno, M.M selaku dosen pembimbing tesis yang dengan sabar membimbing, memberikan saran dan dukungan untuk penulis.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama masa kuliah.
6. Keluarga kecilku, Mama dan Adek Farhan yang selalu menjadi semangat dan motivasi penulis agar bisa menjadi lebih baik disetiap harinya.

7. Seluruh Keluarga Besar tersayang yang selalu memberikan dukungan baik secara material maupun doa, kasih sayang, bimbingan, dan juga ridho yang tiada henti selama penulis hidup. Semoga kita semua selalu dalam kebahagiaan dan keselamatan.
8. Manajemen KSPPS Tamzis Bina Utama yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melanjutkan studi pada jenjang ini, semoga kita selalu istiqomah untuk berdakwah dalam Ekonomi Syariah.
9. Teman-teman program Magister Manajemen Angkatan 58 yang sudah berjuang bersama dalam menggapai gelar magister.
10. Semua pihak yang terlibat dan membantu penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terima Kasih.

Semoga semua do'a dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari-Nya berupa kemudahan disetiap urusan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan masukan dari pembaca untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 25 Oktober 2024.

Penulis,

Wahyu Isnainianto Hadi

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN	ii
BERITA ACARA UJIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
2.1 Kajian Pustaka.....	10
2.1.1 Pembiayaan	10
2.1.2 Jenis Pembiayaan	11
2.1.3 Analisis Penilaian Pembiayaan	12
2.1.3 Risiko Pembiayaan.....	16
2.1.4 Permodalan.....	18
2.1.5 Tingkat Efisiensi	19
2.1.5 Kinerja Keuangan	20
2.1.6 Inflasi	21
2.1.7 Produk Domestik Bruto (PDB).....	22
2.1.8 BI Rate	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Hipotesis	26
2.4 Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
3.2 Obyek Penelitian	35

3.3	Data dan Jenis Data	35
3.4	Populasi dan sampel	36
3.5	Definisi Operasional Variabel	37
3.6	Analisis Data	42
3.7	Analisis Deskriptif.....	42
3.8	Asumsi Klasik	42
3.9	Uji Pemilihan Model Data Panel	44
3.10	Uji Hipotesis	46
<u>BAB IV</u> HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	49
4.2	Pemilihan Model Data Panel	50
4.3	Hasil Uji Hipotesis.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		65
5.1	Kesimpulan	65
5.2	Saran.....	68
Daftar Pustaka.....		69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan BPRS menurut golongan Pembiayaan	4
Tabel 1.2 Kriteria Tingkat Kesehatan NPF	17
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	49
Tabel 4.2 Chow-test.....	50
Tabel 4.3 Hausman-Test	51
Tabel 4.4 Lagrange Multiplier-Test	52
Tabel 4.5 Uji Koefisien Determinasi (R squared).....	52
Tabel 4.6 Hasil Uji F (Simultan).....	53
Tabel 4.7 Hasil Uji t (Parsial).....	54

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak faktor internal seperti CAR, BOPO dan ROA dan juga faktor eksternal seperti BI Rate, Inflasi, dan PDB terhadap risiko pembiayaan pada BPRS di Indonesia. Risiko pembiayaan dalam penelitian ini menggunakan rasio *Non Performing Finance* atau NPF. Penelitian ini menggunakan sampel data 75 BPRS di Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangannya pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Secara parsial variabel BOPO, ROA, CAR dan BI Rate berpengaruh signifikan positif terhadap NPF BPRS di Indonesia. Sementara itu variabel inflasi dan PDB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia. Kemudian secara simultan atau bersama-sama variabel independen (BOPO, CAR, ROA, PDB, Inflasi, dan BI Rate) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu NPF.

Kata Kunci : CAR, BOPO, ROA, BI Rate, Inflasi, PDB, *Non Performing Finance*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia keuangan dan perbankan memiliki peran penting dalam berlangsungnya kegiatan perekonomian suatu negara. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baiknya kondisi perbankan disuatu negara semakin baik juga kondisi perekonomiannya (Samsudin, 2020). Fungsi utama perbankan adalah sebagai lembaga *intermediary* yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dalam istilah perekonomian, kegiatan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada nasabah disebut dengan *lending*. Dengan kegiatan *lending* ini diharapkan Bank mampu menjadi mitra bagi perusahaan besar maupun skala kecil seperti UMKM untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka. Pada sisi lain, dana Bank bisa berasal dari Bank itu sendiri, dana dari masyarakat dan juga dari pinjaman pihak lain. Dalam hal ini Bank juga harus menjadi tempat yang aman bagi para deposan untuk menyimpan dana mereka.

Sistem perbankan yang dianut di Indonesia menggunakan *dual banking system* dimana nasabah dapat melakukan pilihan layanan antara produk Bank Konvensional atau Bank Syariah. Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu lembaga yang menawarkan produk-produk keuangan berdasarkan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah juga berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Dalam keuangan syariah pembiayaan merupakan kegiatan utama Lembaga Keuangan untuk mendapatkan pendapatan melalui pendapatan bagi hasil, margin atau ujroh. Semakin besar pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu Lembaga Keuangan maka risiko yang ditanggung juga semakin besar, salah satu risiko yang ditanggung oleh Lembaga Keuangan

ialah pembiayaan bermasalah atau biasa disebut *Non Performing Financing* (NPF) pada Lembaga Keuangan Syariah dan *Non Performing Loan* (NPL) pada Lembaga Keuangan Konvensional. Pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat tidak semua dapat dikategorikan pembiayaan yang sehat, ada pembiayaan yang memiliki kualitas buruk atau yang memicu terjadinya pembiayaan bermasalah. Tingginya angka NPF ini dapat menjadi indikator tidak sehatnya sebuah Lembaga Keuangan Syariah. Sangatlah penting bagi sebuah Lembaga Keuangan Syariah untuk selalu menjaga rasio NPF sesuai regulasi yang ditetapkan (Hidayat *et al*, 2022).

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diamati secara cermat dan tepat. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio untuk menilai kemampuan suatu manajemen bank dalam mengelola kredit yang telah disalurkan. Semakin kecil nilai NPF suatu perbankan, maka semakin baik performa kinerja keuangan bank tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh pihak ketiga tidak mengalami kesulitan dalam membayarkan atau mengembalikan dana yang telah dipinjam saat jatuh tempo (Supriyanto *et al*, 2020). NPF pada sebuah Lembaga Keuangan bila dibiarkan tanpa adanya sebuah tindakan yang efektif dan efisien akan mengakibatkan terjadinya *financial distress*. Istilah *financial distress* berarti perusahaan kehilangan pendapatan atau uangnya sehingga tidak mampu menutupi biayanya sendiri karena tingkat biaya yang lebih tinggi dari modal, sehingga berakibat perusahaan kesulitan dana untuk menutupi kewajibannya (Kurnia *et al*, 2017). Meningkatnya NPF secara terus menerus juga akan memberikan pengaruh negatif pada Lembaga Keuangan, dampak negatif tersebut salah satunya adalah mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan (Salam, 2018).

Kinerja sebuah Lembaga Keuangan menjadi tolak ukur untuk menilai tingkat kemampuan berkompetisi dari bisnis keuangan dan perbankan. Dalam menilai kinerja Lembaga Keuangan dapat dilakukan dengan berbagai macam indikator pengukuran atau

variabel, salah satunya adalah dengan analisis laporan keuangan. Dari laporan keuangan inilah dapat dihitung angka rasio keuangan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam penilaian kinerja sebuah Lembaga Keuangan. Kondisi internal Lembaga Keuangan yang satu dengan yang lain tentu akan berbeda. Hal ini digambarkan pada berbedanya angka-angka rasio keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing Lembaga Keuangan. Faktor internal ini juga menjadi salah satu faktor timbulnya suatu kredit atau pembiayaan bermasalah. Hal ini berkaitan dengan kegiatan operasional Lembaga Keuangan termasuk kebijakan dan strategi yang ditempuh terkait pemberian pembiayaan yang tertuang dalam laporan keuangan dan *annual report* (Mahmoedin, 2004).

Sektor usaha mikro masih menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 60,5% dan mampu menyerap 123,3 ribu tenaga kerja. UMKM juga mampu menyerap kredit terbesar pada tahun 2018 sebesar kurang lebih Rp. 1 triliun (<https://djpb.kemenkeu.go.id>). Tingginya angka penyerapan kredit pada usaha mikro tidak terlepas dari semakin bertumbuhnya Lembaga Keuangan yang mampu memberikan fasilitas atau layanan terhadap para pelaku sektor mikro ini. Kendala bagi umumnya pengusaha mikro adalah kurangnya akses pada sistem perbankan modern, sehingga diperlukan adanya alternatif sistem kredit yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Lembaga Keuangan sektor mikro yang sudah beberapa tahun kebelakang mampu memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan antara lain Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Bahagia, 2022).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdiri di Indonesia sebagai salah satu upaya pemerataan pelayanan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Faktor agama Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia juga melatarbelakangi muncul dan berkembangnya sebuah BPRS. Diharapkan kehadiran BPRS

mampu melayani dan memfasilitasi masyarakat Muslim terutama pada sektor kecil dan menengah sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan menciptakan kesejahteraan (Azkia *et al*, 2023). Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah pembiayaan BPRS untuk sektor UMKM terus mengalami peningkatan sesuai tabel berikut:

Tabel 1.1 Pembiayaan BPRS menurut golongan Pembiayaan (dalam Juta Rupiah)

Golongan	Des 2019	Des 2020	Des 2021	Des 2022	Des 2023
UMKM	5.841.290	5.469.397	6.273.086	8.249.811	9.769.759
Non UMKM	4.102.030	5.212.103	5.710.715	6.198.464	7.255.697
TOTAL	9.943.320	10.681.499	11.983.801	14.448.275	17.025.456

Sumber: Statistik OJK tahun 2023

Dari data tabel 1.1 tersebut jumlah total pembiayaan yang disalurkan BPRS kepada golongan UMKM dan Non-UMKM terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2023. Hanya pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penyerapan Pembiayaan BPRS pada sektor UMKM karena adanya wabah Pandemi Covid-19 yang masuk Indonesia pada awal tahun 2020. Dengan terus meningkatnya angka penyerapan pembiayaan pada BPRS mengindikasikan pentingnya peran BPRS pada pengembangan sektor ekonomi di Indonesia khususnya pada sektor UMKM (Sofyan, 2021).

Kredit perbankan memiliki peran penting dalam pengendalian moneter dan kegiatan perekonomian, sehingga Bank Indonesia menetapkan berbagai kebijakan untuk menciptakan sebuah sistem perkreditan yang sehat. Kebijakan tersebut di antaranya meliputi kebijakan mengenai tingkat suku bunga, penekanan kebijakan tersebut ditekankan pada prinsip kehati-hatian dan sektor-sektor ekonomi yang perlu diberi dorongan untuk menerima kredit. Prinsip ini biasa dikenal dengan *the prudential principle of banking* (Irham, 2014). Bank Permbiayaan

Rakyat Syariah (BPRS) secara regulasi dibawah pengawasan dari Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga dalam operasionalnya harus selalu sesuai dengan aturan yang ditetapkan termasuk didalamnya regulasi atau kebijakan ekonomi Bank Indonesia terhadap sebuah Lembaga Keuangan. Regulasi dari BI maupun OJK merupakan faktor eksternal bagi kinerja operasional sebuah BPRS di Indonesia. Faktor eksternal yaitu berasal dari luar manajemen Lembaga Keuangan, yakni faktor yang berhubungan dengan kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, persaingan dan kondisi nasabah (Mahmoedin, 2004).

Persaingan dalam industri jasa keuangan saat ini telah memasuki fase yang lebih ketat dibanding beberapa tahun terakhir. Hampir semua perbankan besar saat ini memiliki unit usaha mikro yang melayani anggota segmen kecil menengah. Kantor-kantor kas juga mulai di buka disekitaran pasar-pasar tradisional sebagai upaya mendekatkan pelayanan terhadap nasabahnya. Seperti yang kita ketahui, segmen mikro ini menjadi pangsa pasar utama sebuah BPRS. Semakin beragamnya pilihan masyarakat untuk mengakses fasilitas jasa keuangan menuntut sebuah BPRS untuk memiliki performa dan juga pelayanan yang baik. Disamping itu, ditengah ketatnya persaingan, BPRS juga diharuskan mampu mengendalikan segala risiko yang ada dalam sebuah Lembaga Keuangan termasuk risiko pembiayaan.

Penelitian mengenai determinan dari NPF atau NPL sampai saat ini sudah dilakukan di berbagai negara. Rasio NPF/NPL merupakan rasio yang perlu dijaga dan dipertahankan sehingga mampu menunjukkan kemampuan sebuah Lembaga Keuangan dalam manajemen risiko kredit/pembiayaan. Bhattarai (2015) menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi rasio NPL di Nepal. Faktor eksternal meliputi variabel makroekonomi yaitu GDP, Inflasi, dan nilai tukar efektif sedangkan faktor internal menggunakan *variabel bank specific* yaitu ukuran, *change in loan*, suku bunga pinjaman dan *loan to total assets*. Hasil penelitian menunjukkan variabel inflasi dan suku bunga pinjaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL. Sementara itu variabel *change in loan* dan nilai tukar efektif

berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL. Variabel GDP dan *size* tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Berbeda dengan hasil penelitian Islamoglu (2015) yang melakukan penelitian tentang faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi tingkat NPL di Bank Turkey. Hasil menunjukkan bahwa GDP dan *commercial loan interest rates* berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat NPL.

Joseph *et al* (2012) mengungkapkan bahwa faktor eksternal lebih lazim dalam menyebabkan kredit macet bank di Zimbabwe. Umar & Sun (2018) melihat faktor-faktor yang mempengaruhi NPL bank di Cina dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat bunga efektif, tingkat inflasi, nilai tukar mata uang asing, jenis bank, perilaku pengambilan risiko bank, konsentrasi kepemilikan, leverage dan kualitas kredit adalah penentu NPL yang signifikan di bank-bank Cina. Sementara itu Kusmayadi, Firmansyah, & Badruzaman (2017) membandingkan faktor yang mempengaruhi NPF dan NPL di bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel SBIS, inflasi dan PDB berpengaruh signifikan negatif terhadap NPF bank syariah. Sedangkan di bank konvensional hanya PDB yang berpengaruh signifikan terhadap NPL.

Purwaningtyas & Hartono (2020) melakukan penelitian tentang faktor-faktor eksternal (makroekonomi) dan internal Bank yang mempengaruhi rasio NPF pada Bank Syariah di Indonesia. Variabel Kurs dan GDP tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat NPF Bank Syariah di Indonesia. Sementara itu variabel inflasi menunjukkan ada pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat NPF. Kemudian faktor internal Bank seperti CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat NPF Bank Syariah. Hasil ini berbeda dengan penelitian Hidayati (2022) yang menyatakan variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Kemudian variabel internal lain yaitu Bank Size dan FDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan hasil penelitian

dari Akbar (2016) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan negatif variabel GDP dan FDR terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Mandasari (2021) juga melakukan penelitian tentang NPF pada Bank Syariah dengan variabel independen ROA dan FDR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap NPF, sedangkan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat NPF. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian dari Supriani (2018) dimana variabel ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF. Sementara itu variabel BOPO dalam penelitian Mirawati (2021) menunjukkan hasil negatif signifikan terhadap NPF, berbeda dengan hasil penelitian dari Supriani (2018) yang menunjukkan variabel BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF.

Nugrohowati & Bimo (2019) mengungkapkan bahwa faktor eksternal seperti *BI Rate* dan *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat NPF pada BPRS di Indonesia. Sementara itu faktor eksternal inflasi dan tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Dalam penelitian ini juga menggunakan faktor internal BPRS yang menunjukkan bahwa CAR dan ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat NPF, sementara itu BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Penelitian lain dengan memilih sampel dari kategori Bank Syariah dilakukan oleh Agustiniingsih (2017) yang menunjukkan hasil berbeda yaitu variabel inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPF. Nuraliyah (2021) melakukan penelitian pengaruh PDB terhadap NPF, hasilnya variabel PDB berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Hasil ini berbeda dengan penelitian dari Islamoglu (2015) yang menunjukkan bahwa PDB berpengaruh negatif signifikan terhadap kredit bermasalah di Turki.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang masih terdapat *research gap* seperti yang diungkapkan di atas, masih perlu dilakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi NPF. Dalam penelitian ini berfokus pada BPRS di Indonesia

dengan mengambil data kuartalan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Penelitian ini ingin menjawab apakah faktor internal berupa rasio CAR, BOPO dan ROA berpengaruh signifikan terhadap NPF. Disamping itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah faktor eksternal seperti BI Rate, Tingkat Inflasi dan PDB juga mempengaruhi NPF pada BPRS di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh CAR terhadap risiko pembiayaan pada BPRS di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap risiko pembiayaan pada BPRS di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh ROA terhadap risiko pembiayaan pada BPRS di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh BI Rate terhadap risiko pembiayaan pada BPRS di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap risiko pembiayaan pada BPRS di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh PDB terhadap risiko pembiayaan pada BPRS di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak faktor internal seperti CAR, BOPO dan ROA terhadap tingkat NPF BPRS di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak faktor eksternal seperti BI Rate, Inflasi, dan PDB terhadap tingkat NPF BPRS di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan dalam penanganan risiko pembiayaan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu media penyerapan ilmu, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa selanjutnya. Dan dapat memperluas

pengenalan praktek keuangan syariah serta mempererat kerjasama antara akademik dengan perusahaan atau lembaga.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat luas tentang rasio-rasio kesehatan sebuah lembaga keuangan, dan mampu dijadikan pedoman dalam memilih lembaga keuangan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pembiayaan

Pembiayaan sering digunakan untuk aktifitas utama dalam sebuah Lembaga Keuangan Syariah. Pada dasarnya istilah pembiayaan memiliki pengertian yang sama dengan istilah kredit. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang atau barang) dengan balasan prestasi atau kompensasi yang akan terjadi pada waktu yang akan datang (Untung,2005). Sedangkan menurut Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah disempurnakan, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi tanggungannya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bagi hasil, imbalan atau bunga (Ridwan,2004).

Pembiayaan merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai *Shohibul Maal* kepada nasabah sebagai *Mudhorib* untuk melaksanakan amanah berupa dana yang telah diberikan oleh bank untuk mendukung kegiatan usaha nasabah berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Adapun dana yang diberikan harus dapat digunakan oleh nasabah dengan sebaik-baiknya yang adil dan sesuai dengan syariat islam serta dapat saling menguntungkan baik untuk pihak bank maupun pihak nasabah

Adapun tujuan dari kegiatan operasional pembiayaan, antara lain sebagai berikut (Rivai and Veithzal, 2008):

(1) *Profitability* atau keuntungan.

Keuntungan yang dimaksud disini adalah keuntungan yang diraih oleh lembaga keuangan dari dana yang disalurkan berupa bagi hasil yang didapatkan dari usaha yang dikelola nasabah. Oleh karena itu, biasanya lembaga keuangan hanya akan menyalurkan dananya kepada nasabah yang dinilai mampu dan mau untuk mengembalikan sejumlah pembiayaan yang diberikan.

(2) *Safety* atau keamanan.

Untuk mencapai tujuan *Profitability* maka pihak bank atau lembaga keuangan lain harus memperhatikan terjaminnya keamanan dari fasilitas yang diberikan. Dalam arti lain, lembaga keuangan harus memastikan bahwa pembiayaan yang telah diberikan dapat dikembalikan oleh nasabah sehingga keuntungan yang diharapkan dapat tercapai.

2.1.2 Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan yang memberikan tingkat penghasilan tertinggi bagi Lembaga Keuangan. Tingkat penghasilan tersebut dapat bervariasi sesuai dengan jenis transaksi pembiayaan yang digunakan (Muhammad, 2011). Adapun jenis-jenis pembiayaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Sunaendi, 2017) :

1. Pembiayaan berdasarkan tujuan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - i. Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk investasi atau pengadaan barang-barang konsumtif.
 - ii. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk menambah modal kerja dalam rangka pengembangan usaha.
2. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu
 - i. Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun

- ii. Pembiayaan Jangka Menengah, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun
 - iii. Pembiayaan Jangka Panjang, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun
3. Pembiayaan berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu (Afrida, 2016):
- i. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan tujuan pemenuhan kebutuhan produksi atau dengan kata lain untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
 - ii. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.

2.1.3 Analisis Penilaian Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebelum menyalurkan dananya kepada nasabah dengan tujuan untuk meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi lembaga keuangan. Oleh karena itu dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang dinyatakan bahwa sebelum menyalurkan dananya kepada nasabah, lembaga perbankan diharuskan untuk memiliki keyakinan atas kembalinya dana yang akan disalurkan kepada nasabah dengan cara menganalisis watak, modal, agunan, kondisi dan juga kemampuan nasabah. Analisis ini biasa dikenal dengan istilah Analisis 5C.

Menurut Kasmir (2012) dalam rangka memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak perbankan harus selalu mempertimbangkan prinsip 5C yang terdiri dari:

1. *Character*

Character disini diartikan sebagai watak atau sifat dari calon nasabah. Sehingga dalam hal analisis pembiayaan, analisis *Character* Merupakan analisis terkait dengan karakter nasabah yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran terkait kemampuan nasabah dalam membayar, perilaku nasabah, riwayat hidup nasabah, reputasi calon nasabah di lingkungan usaha dan meminta informasi antarbank.

2. *Capital*

Capital merupakan salah satu prinsip yang digunakan untuk menilai keefektifan penggunaan modal sendiri yang dimiliki pemohon dengan mempertimbangkan kualitas likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran-ukuran yang lainnya (Kasmir, 2017). *Capital* digunakan sebagai ukuran persen dana pemohon yang dilibatkan dalam permohonan pembiayaan. semakin banyak yang dilibatkan dalam permohonan pembiayaan, maka pihak bank akan lebih yakin dalam memberikan kredit atau pembiayaan terhadap pemohon (Ismail, 2010).

3. *Capacity*

Capacity merupakan kemampuan yang dimiliki nasabah dalam mengelola usahanya untuk menghasilkan laba dan juga kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan. Kemampuan keuangan nasabah penting untuk dianalisis karena merupakan sumber utama dalam pengembalian pembiayaan yang diberikan bank. Semakin baik kemampuan keuangan nasabah, maka kualitas pembiayaan pun juga akan semakin baik (Ismail, 2011). Dengan demikian besar kemungkinan pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menilai *Capacity*, yaitu sebagai berikut (Kasmir, 2017).

- a. Pendekatan Yuridis, merupakan pendekatan yang dilakukan melalui seseorang yang memiliki wewenang untuk mewakili calon nasabah pembiayaan dalam hal penandatanganan surat perjanjian pembiayaan.
- b. Pendekatan Historis, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat riwayat kinerja calon nasabah pembiayaan di masa lalu.
- c. Pendekatan Manjerial, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam mengelola usahanya.
- d. Pendekatan finansial, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
- e. Pendekatan teknis, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat kemampuan nasabah terkait dengan teknis usahanya, mulai dari persiapan bahan baku, tenaga kerja, pralatan dan lain-lain hingga usahanya dapat beroperasi.

4. Collateral

Collateral merupakan barang yang diberikan nasabah baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik yang disertakan pada saat mengajukan pembiayaan. Jaminan yang diberikan oleh nasabah hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diajukan. Selain itu, jaminan hendaknya diteliti keabsahannya dari segi hukum agar pada saat terjadi masalah pada pembiayaan nasabah, jaminan dapat digunakan secepat mungkin.

Jaminan merupakan sumber pembayaran kedua, dikatakan demikian karena apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti gagal bayar, maka pihak bank atau pihak lembaga keuangan lainnya dapat mengeksekusi jaminan yang diserahkan

(Dermawan, 2012). Itulah sebabnya mengapa nilai jual nasabah diharuskan melebihi jumlah pembiayaan yang diajukan.

Pertimbangan atas jaminan biasanya dikenal dengan MAST (Ismail, 2018), yaitu:

a. *Marketability*, yaitu agunan yang diserahkan haruslah memiliki nilai market atau dapat diperjualbelikan.

b. *Ascertainability of Value*, yaitu agunan yang diserahkan hendaknya memiliki harga yang pasti.

c. *Stability of Value*, yaitu agunan yang diserahkan kepada bank hendaknya memiliki harga yang stabil, sehingga tetap dapat menutupi jumlah pembiayaan yang diberikan.

d. *Transferability*, yaitu agunan yang diserahkan kepada bank hendaknya mudah dipindahtangankan dan mudah dipindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

5. Condition of Economy.

Condition of Economy merupakan suatu analisis terhadap prospek usaha pemohon yang akan dibiayai dengan melihat kondisi perekonomian saat ini dan dimasa mendatang. Usaha yang akan dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik akan dapat meminimalisir terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah (Tamin, 2012).

Condition of Economy merupakan kondisi perekonomian. Dalam menilai kredit, hendaknya lembaga keuangan juga menilai kondisi ekonomi saat ini dan juga kondisi ekonomi di masa depan. Analisis *Condition* dapat peroleh dengan memperhatikan dan *update* terkait peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik dan perekonomian dunia, serta keadaan lain yang dapat mempengaruhi pemasaran.

Dalam memberikan pembiayaan pada bidang usaha, sebaiknya pihak bank maupun lembaga keuangan lainnya jeli dan teliti dalam menilai perekonomian pengusaha. Keberlangsungan industri saat ini yang sedang terjadi harus diketahui, seperti kemungkinan terjadinya perpunahan, adanya persaingan, teknologi yang digunakan serta permintaan atas produk. Jika calon nasabah tidak memiliki usaha yang memiliki nilai ekonomis, maka pihak bank atau lembaga keuangan lainnya harus lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan (Dermawan, 2012).

Analisis 5C terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan ditujukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang merugikan. Sehingga dengan melakukan analisis ini, pihak bank maupun nasabah tidak melakukan hal-hal yang merugikan salah satu pihak.

2.1.4 Risiko Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi pada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih. Namun tidak semua pembiayaan yang disalurkan memiliki kriteria lancar dari segi angsuran. Ada beberapa nasabah atau anggota yang memiliki performa angsuran yang rendah sehingga menimbulkan suatu risiko pembiayaan di lembaga keuangan. Risiko ini dapat diukur menggunakan NPF atau Non Performing Financing.

NPF (*Non Performing Financing*) atau yang dikenal sebagai NPL (*Non Performing Loan*) dalam Lembaga Keuangan Konvensional, merupakan pembiayaan tidak lancar dimana nasabah mengalami kesulitan dalam mengembalikan pokok pinjaman beserta ujroh, margin atau nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian (akad) (Antonio, 2001). Hal ini dapat menyebabkan lembaga keuangan

berada dalam masalah kesulitan likuiditas dan dapat menurunkan kualitas aset yang dimiliki oleh lembaga keuangan (Chapra, 2008).

Untuk mengetahui besarnya tingkat NPF pada suatu lembaga keuangan, Bank Indonesia menginstruksikan dalam Surat Edaran No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang perhitungan rasio keuangan bank, bahwa NPF dirumuskan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Nilai NPF menunjukkan seberapa besar tingkat pembiayaan yang bermasalah yang dialami oleh suatu lembaga keuangan. Dimana semakin tinggi persentase NPF menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan pada suatu lembaga tersebut semakin buruk.

Sementara itu, untuk mengetahui suatu lembaga keuangan dikatakan sehat atau tidak, Bank Indonesia telah menetapkan kriteria kesehatan NPF sebagai bahan perbandingan. Adapun kriteria kesehatan NPF tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kriteria Tingkat Kesehatan NPF

No	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF = 2\%$	Sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran BI No. 9/24/Dpbs tahun 2007

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lembaga keuangan dikatakan sehat apabila memiliki nilai NPF kurang dari 5%, dikatakan cukup sehat apabila nilai NPFnya kurang dari 8%, kurang sehat apabila nilai NPF nya dibawah 12% dan tidak sehat apabila nilai NPF nya sebesar 12% atau lebih.

Setelah NPF dalam suatu lembaga atau bank diketahui, maka pihak lembaga keuangan atau bank harus segera mengambil langkah untuk menangani pembiayaan

yang bermasalah. Karena tingginya tingkat NPF sangat berbahaya bagi kelangsungan operasional suatu lembaga atau bank.

Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dan upaya yang bersifat represif. Upaya yang bersifat preventif dapat dilakukan sejak permohonan pemberian pembiayaan diajukan oleh nasabah seperti melakukan analisis yang akurat, melakukan perjanjian yang benar, pengikatan jaminan hingga mengawasi serta memantau pembiayaan yang telah diberikan. Apabila upaya yang bersifat preventif tidak efektif, maka upaya yang bersifat represif harus dilakukan. Upaya yang bersifat represif adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Seperti melakukan penjadwalan ulang (*recheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), dan Penataan kembali (*restructuring*).

Apabila setelah melakukan upaya restrukturisasi, nasabah tetap kesulitan dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterima, maka jalan terakhir yang dapat dilakukan lembaga keuangan adalah dengan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam arti bahwa lembaga keuangan melakukan upaya atau tindakan menarik kembali pembiayaan dari nasabah yang berkategori macet dengan melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif seperti melikuidasi jaminan yang telah diserahkan kepada bank pada saat akad terjadi.

2.1.5 Permodalan

CAR (*Capital Adequacy Rasio*) merupakan rasio yang dapat menunjukkan kemampuan suatu lembaga dalam penyediaan dana yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha atau untuk pelindung risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan operasional lembaga tersebut (Greuning and Iqbal, 2011).

CAR juga diartikan sebagai rasio yang memperlihatkan kemampuan aktiva suatu lembaga yang mengandung risiko yang ikut dibiayai oleh modal sendiri disamping mendapatkan sumber dana dari luar lembaga seperti dana dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain. Modal merupakan sesuatu kekayaan yang dapat menghasilkan kekayaan yang lain. Modal tidak boleh diabaikan atau dibiarkan mengendap oleh pemiliknya. Sehingga, pemilik modal harus berupaya menggunakannya dengan baik agar dapat terus produktif dan tidak habis digunakan.

Adapun kriteria penilaian CAR menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang kewajiban penyediaan modal minimum Bank Umum Syariah bahwa bank harus menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko. sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 101/15/PBI/2008, standar CAR yang ditentukan oleh Bank Indonesia hanya 8%. Jika suatu lembaga memiliki nilai CAR dibawah 8%, maka lembaga tersebut dianggap tidak sehat.

Secara sistematis, CAR dapat dirumuskan sebagai berikut

$$CAR = \frac{Modal}{ATMR} \times 100\%$$

ATMR adalah nilai total dari masing-masing aktiva setelah dikalikan dengan bobot risiko masing-masing aktiva dari 0% hingga 100%. Aktiva dengan bobot 100% merupakan aktiva yang memiliki risiko paling tinggi.

2.1.6 Tingkat Efisiensi

Menurut Rivai, dkk (2013) BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya dengan membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional. Semakin kecil

nilai BOPO maka akan semakin baik karena lembaga yang bersangkutan dapat menutup beban operasionalnya dengan pendapatan operasional yang didapatkan

Secara sistematis BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut

$$BOPO = \frac{Biaya\ Operasional}{Pendapatan\ Operasional} \times 100\%$$

Standar rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah sebesar 94%-96%. Nilai BOPO yang semakin rendah menunjukkan bahwa lembaga tersebut dalam keadaan sehat.

2.1.7 Kinerja Keuangan

Menurut Harahap (2013), ROA menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh diukur dari nilai aset. Return On Asset (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan, karena Return On Asset digunakan untuk mengukur efektivitas dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar. Pada sisi lain, kinerja bank dapat pula dijadikan sebagai tolak ukur kesehatan bank tersebut apakah pengelolaan usaha perbankan telah dilakukan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku (Tristingtyas, 2013). ROA merupakan suatu rasio untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu Bank.

Return on Asset (ROA) adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset bank, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang

bersangkutan (Hasibuan, 2001). Setiap kenaikan rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih.

ROA dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset} \times 100\%$$

2.1.8 Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan harga dalam suatu perekonomian yang berlangsung lama. Dalam KBBI disebutkan bahwa Inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

Menurut Nanga (2005), terdapat dua jenis inflasi dilihat dari faktor penyebabnya, yaitu:

1) Inflasi tarikan permintaan, yaitu inflasi yang terjadi sebab adanya kenaikan permintaan agregat yang terlalu besar.

2) Inflasi dorongan biaya, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biayan produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi perusahaan.

Menurut Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo, kisaran sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 2-4%. Tingkat inflasi yang lebih rendah dari 2% mengindikasikan lemahnya permintaan masyarakat dan ekonomi nasional belum berjalan dengan baik (Elena, 2021). Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Riset *Center Of Reform on Economics* (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, bahwa tingkat inflasi yang ideal bagi perekonomian Indonesia adalah berkisar 2%. Menurutnya, inflasi yang terlalu rendah atau bahkan deflasi tidak akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi (Aivanni, 2019).

Berdasarkan tingkat kenaikan harganya, inflasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Inflasi ringan, yaitu apabila nilai inflasi < 10% pertahun.
2. Inflasi sedang, yaitu apabila inflasi memiliki nilai 10-30% pertahun.
3. Inflasi berat, yaitu apabila inflasi memiliki nilai 30-100%.
4. Inflasi sangat berat, yaitu apabila inflasi memiliki nilai lebih dari 100% pertahun.

2.1.9 Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pertumbuhan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu dengan menjumlahkan semua output dari warga negara yang bersangkutan ditambah dengan warga negara asing yang bekerja di negara bersangkutan (Putong,2002). PDB terbagi menjadi dua, yaitu PDB riil dan PDB nominal. PDB riil adalah ukuran yang paling luas yang dapat menggambarkan keseluruhan kondisi perekonomian. Seringkali para ekonom menggunakan PDB riil untuk dapat menggambarkan kemakmuran ekonomi. Hal tersebut dikarenakan mengukur kemakmuran ekonomi yang lebih baik akan menghitung output barang dan jasa perekonomian dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan harga (Mankiw,2003).

Dari ketiga metode tersebut di atas yang sering digunakan adalah metode pengeluaran/penggunaan dengan rumus sebagai berikut (Kurniawan, 2015):

$$PDB = C + I + G (X - M)$$

Keterangan:

C : Pengeluaran konsumsi barang dan jasa pribadi

I : Investasi

G : Pengeluaran untuk belanja pemerintah baik dari konsumsi maupun investasi

X : Mewakili ekspor

E : Mewakili impor

Perkembangan PDB sebagai salah satu indikator dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. PDB ini mencerminkan kapasitas keluaran yang dapat dihasilkan perekonomian dengan memanfaatkan segenap sumber daya yang ada dalam perekonomian (Mukhlis,2015). Kaitannya dengan pembiayaan bermasalah, dalam kondisi resesi dimana terjadi penurunan penjualan dan pendapatan individu maupun perusahaan, maka akan mempengaruhi kemampuan individu maupun perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya menyebabkan bertambahnya pembiayaan bermasalah. Namun sebaliknya ketika PDB meningkat artinya kondisi perekonomian masyarakat juga ikut membaik sehingga resiko pembiayaan bermasalah juga turun.

2.1.10 BI Rate

BI Rate atau suku Bunga bank Indonesia merupakan bunga yang ditetapkan oleh bank sentral yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang diumumkan kepada masyarakat umum, dalam hal ini ialah Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Sistem perbankan Indonesia masih menggunakan *dual banking system* yaitu bank konvensional dan bank syariah. Suku bunga kredit bank umum akan meningkat apabila BI Rate mengalami kenaikan, sehingga dapat berpengaruh terhadap pembiayaan pada bank yaitu meningkatnya pembiayaan bermasalah.

Ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya disebabkan tingginya beban bunga yang ditanggung. Walaupun perbankan syariah tidak mengenal sistem bunga dalam menjalankan operasionalnya, namun secara tidak langsung kenaikan BI Rate dijadikan benchmark oleh bank syariah, selain itu baik bank syariah maupun konvensional tidak dapat menghindari persaingan di industri perbankan sebagai sesama lembaga bisnis. Tingkat persaingan antara kedua sistem bank menjadikan kebijakan yang diambil salah satu pihak akan mempengaruhi perbankan yang lain. Dalam hal ini ketika terjadi kenaikan suku bunga BI maka nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan di bank konvensional akan beralih ke bank syariah karena tingginya suku bunga di bank konvensional. Hal ini akan menyebabkan pembiayaan di bank syariah akan semakin tinggi dan berpengaruh terhadap rasio NPF yang semakin besar. Begitu juga sebaliknya ketika BI Rate turun, maka perbankan konvensional juga akan menurunkan tingkat suku bunganya, sehingga margin bagi hasil pada BPRS sebagai perbankan Syariah juga akan kompetitif dan akan mengurangi pembiayaan bermasalah pada BPRS itu sendiri (Nugrohowati & Bimo, 2019).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan oleh peneliti sebagai salah satu sumber acuan dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian terdahulu, peneliti dapat menggali informasi-informasi yang dibutuhkan serta dapat memperluas teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Ciukay & Kil (2020) faktor makroekonomi GDP dan inflasi memiliki pengaruh negative signifikan terhadap tingkat NPL. Sedangkan variabel *Banking Credit Policy* memiliki pengaruh positif signifikan. Islamoglu (2015) melakukan penelitian tentang faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhi tingkat NPL

di Bank Turkey. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GDP dan commercial loan interest rates berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat NPL. Penelitian lain juga dilakukan oleh Bhattarai (2015) yang menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi rasio NPL di Nepal. Faktor eksternal meliputi variabel makroekonomi yaitu GDP, Inflasi, dan nilai tukar efektif. Hasil penelitian menunjukkan variabel inflasi dan suku bunga pinjaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPL. Sementara itu variabel change in loan dan nilai tukar efektif berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL, sedangkan variabel GDP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL.

Fajar & Umanto (2017) juga melakukan penelitian tentang dampak makroekonomi terhadap tingkat NPL di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDB dan inflasi berpengaruh negative signifikan terhadap NPL. Variabel makroekonomi lain yaitu BI Rate tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL Bank di Indonesia. Hasil penelitian Trung (2019) menghasilkan fenomena berbeda, dimana variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Sejalan dengan penelitian dari Santoso & Alexandri (2015) dimana variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Variabel GDP juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat NPL, berbeda dengan hasil penelitian dari Fajar & Umanto (2017).

Nuraliyah (2021) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan variabel inflasi dan PDB berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat NPF Bank. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rehman (2017) yang menyatakan bahwa tingkat inflasi dan GDP berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat NPL perbankan di Kawasan Asia Selatan. Windasari & Diatmika (2021) juga melakukan penelitian tentang dampak faktor eksternal terhadap NPF Bank Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga

menunjukkan bahwa variabel inflasi dan skor tukar rupiah sebagai faktor eksternal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat NPF Bank Syariah.

Menurut penelitian Ciukay & Kil (2020) variabel internal Bank yaitu ROA memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat NPL. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Mandasri (2021), Nugrohowati & Bimo (2019) dan Anjom & Karim (2016) yang menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat NPL atau NPF Bank. Penelitian dari Santoso & Alexandri (2015) menghasilkan hasil penelitian yang berbeda dimana ROA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap NPF.

Fajar & Umanto (2017) meneliti dampak variabel BOPO terhadap tingkat NPF Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan positif terhadap rasio NPL. Hasil penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian lain oleh Rofi'ah & Alvira (2019) , Safitri dkk (2020), Perdani dkk (2019), dan Sugiharto dkk (2019) yang menyatakan bahwa BOPO memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NPL atau NPF bank.

Trung (2019) melakukan penelitian tentang dampak rasio CAR terhadap NPL. Hasil menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayati dkk (2022) bahwa rasio CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Amelia (2019), Rofi'ah & Alvira (2019), dan Akbar (2016) yang menunjukkan pengaruh negatif signifikan antara variabel CAR dengan NPL atau NPF Bank.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh ROA terhadap Non Performing Financing (NPF)

ROA adalah hasil perhitungan laba sebelum pajak dibagi rata-rata total asset. Kasmir (2007) berpendapat bahwa *Return on Assets* adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh modal kerja yang ada dan dikelola secara efisien.

Atau dengan kata lain, ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah asset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut (Mandasari, 2021).

Rasio ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan sebuah bank dalam memperoleh keuntungan, maka tingginya rasio ROA menunjukkan pembiayaan cenderung lancar, dan kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya juga cenderung lebih lebih baik ketika rasio ROA tinggi (Nugrohowati & Bimo, 2019). Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Azizah (2022) yang menunjukkan ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap NPF. Jika ROA perbankan bertambah, akan bertambah juga laba bank tersebut dan bank dapat semakin baik dari pemakaian asetnya. Peningkatan rasio ROA tentunya akan menurunkan rasio pembiayaan bermasalah yang ada pada Lembaga Keuangan, karena dengan tingginya rasio ROA maka itu artinya keuntungan yang diperoleh oleh bank juga semakin tinggi. Ketika keuntungan yang diperoleh tinggi maka pembiayaan bermasalah seperti kredit macet juga akan kecil.

H1: ROA berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing (NPF)

2.3.2 Pengaruh BOPO terhadap Non Performing Financing (NPF)

BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan rasio yang dapat menunjukkan kemampuan suatu lembaga dalam mengelola biaya operasionalnya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi nilai BOPO, maka berarti biaya yang dikeluarkan juga tinggi daripada pendapatan yang didapatkan. Sehingga, pendapatan yang didapatkan tidak mampu menutup kerugian yang kemungkinan disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.

Menurut Dahlan Siamat (2012) dalam jurnal Kusmayadi (2017), risiko operasional terjadi karena adanya ketidakpastian dalam usaha bank, adanya kerugian

dari operasional yaitu menurunnya tingkat keuntungan yang diperoleh dan terjadinya kegagalan atas jasa – jasa dan produk yang ditawarkan. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perbankan untuk kegiatan operasional seperti dalam biaya gaji, biaya pemasaran, biaya bunga.

Hasil penelitian dari Safitri (2020) menunjukkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif signifikan terhadap Non-Performing Financing (NPF) yang artinya apabila BOPO meningkat, maka NPF juga akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan bank, maka akan berdampak pada risiko pembiayaan yang buruk. BOPO digunakan untuk menilai seberapa efektif bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sesuai dengan Teori Antisipasi Pendapatan. Bank harus mampu meminimalisir besarnya biaya yang dikeluarkan, karena akan berdampak pada berkurangnya dana yang diputar dan biaya yang digunakan sebagai cadangan dalam mengantisipasi kerugian sehingga tidak dapat menutupi risiko pembiayaan yang tinggi

Upaya Lembaga Keuangan dalam menekan biaya operasionalnya dan menambah pendapatan operasionalnya akan menghasilkan rasio BOPO yang kecil sehingga hal tersebut juga akan menurunkan tingkat pembiayaan yang ada pada perbankan. Dimana pada saat Bank memiliki pendapatan yang banyak, maka itu berarti tingkat kredit macet sangatlah rendah. BOPO merupakan salah satu indikator tingkat efisiensi bank yaitu dengan membandingkan antara Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Perbankan dapat dikatakan efisien apabila rasio BOPO mengalami penurunan. Bank yang semakin efisien dapat diartikan bahwa kemampuannya mengelola input untuk menghasilkan output semakin baik. Pengelolaan tersebut termasuk didalamnya adalah manajemen risiko kredit, sehingga

Bank yang efisien akan mampu memanfaatkan input untuk menghasilkan output yang maksimum. Untuk mendapatkan output yang maksimum tidak mungkin dapat terjadi jika pengelolaan risiko kreditnya buruk (Nugrohowati & Bimo, 2019).

H2: BOPO berpengaruh positif terhadap Non Performing Financing (NPF)

3 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Non Performing Financing (NPF)

Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi bank dalam mengembangkan usahanya dan menampung risiko kerugian. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh resiko usaha yang dihadapi oleh bank. Modal bank diwakilkan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko, yang dibiayai dari modal sendiri (Akbar, 2016).

Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit seperti kredit yang bermasalah (Saputra, 2012). Jika suatu perbankan memiliki CAR yang tinggi akan mengurangi risiko NPF yang akan terjadi, karena kecukupan modal yang dimiliki dapat menampung risiko terjadinya NPF (Perdani *et al*, 2019). Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian dari Purwaningtyas & Hartono (2020) yang menyatakan semakin tinggi nilai CAR menunjukkan modal bank mengalami peningkatan, sehingga mengurangi NPF. Hal tersebut menampilkan bahwa peningkatan kecukupan modal bank akan mengelola risiko pembiayaan masalah lebih mudah, yang dapat menurunkan nilai NPF (Effendi *et al.*, 2017).

H3: Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing (NPF)

4 Pengaruh Inflasi terhadap Non Performing Financing (NPF)

Inflasi secara umum didefinisikan sebagai naiknya harga barang dan jasa sebagai akibat jumlah uang (permintaan) yang lebih banyak dibandingkan jumlah barang dan jasa yang tersedia (penawaran). Pertumbuhan jumlah uang yang melebihi pertumbuhan sektor riil inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi karena mengakibatkan daya beli uang selalu menurun, resiko daya beli merupakan nilai riil dari uang yang dipinjamkan ditambah dengan pembayaran bunga menjadi lebih kecil daripada yang diharapkan. Sehingga dengan adanya hal ini bank syariah bersikap hati-hati dalam pemberian dana (Yunis, 2008).

Inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro termasuk kegiatan investasi. Saat terjadi inflasi terdapat perubahan daya beli masyarakat yang akan menurun karena secara riil tingkat pendapatannya juga menurun pada saat terjadi inflasi (Martono & Sarjito, 2015). Saat konsumsi akan barang dan jasa turun artinya permintaan akan barang dan jasa juga turun. Dengan asumsi tingkat penawaran konstan, maka pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat penghasilan produsen. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kapasitas debitur dalam hal ini produsen dalam pengembalian pinjamannya (Febrianti, 2015). Tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan turunnya pendapatan riil masyarakat sebagai nasabah suatu perbankan. Sebelum terjadi kenaikan inflasi, masyarakat masih memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan harian dan juga membayar angsuran. Namun saat harga kebutuhan pokok naik akibat inflasi, sedangkan pendapatan masyarakat tetap, mereka akan cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok harian mereka

daripada kebutuhan lain termasuk pembayaran angsuran di Bank (Lidyah, 2016). Pembayaran angsuran yang semakin tidak tepat menimbulkan kualitas kredit semakin buruk bahkan terjadi kredit bermasalah (Taswan, 2010). Dari uraian teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dirumuskan hipotesis yaitu:

H4 : Inflasi berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

5 Pengaruh *Gross Domestic Product* (GDP) / Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Komponen yang ada dalam *Gross Domestic Product* (GDP) yaitu pendapatan, pengeluaran/investasi, pengeluaran pemerintah dan selisih ekspor-import (Akbar, 2016). Menurut Fathonah & Hermawan (2020) GDP adalah nilai barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu negara dengan faktor produksi milik warga tersebut dan negara asing. GDP juga digunakan sebagai indikator untuk mempelajari perekonomian sebuah negara dari waktu ke waktu, maupun sebagai indikator untuk membandingkan beberapa kondisi perekonomian.

Saat perekonomian sektor makro meningkat maka akan meningkatkan aktivitas ekonomi. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas debitur dalam mengembalikan pinjamannya. Ketika kemampuan masyarakat dalam mengembalikan pinjamannya meningkat dan masyarakat membayar pinjamannya tepat waktu maka kemungkinan terjadinya pembiayaan akan berkurang. Sehingga dapat

dikatakan bahwa ketika GDP meningkat akan menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah (Rahma *et al*, 2021)

Dalam kondisi resesi dimana terjadi penurunan penjualan dan pendapatan perusahaan, maka akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjamannya. Hal ini akan menyebabkan bertambahnya outstanding kredit non lancar (Rahmawulan, 2008). Sementara itu ketika *Gross Domestic Product* (GDP) meningkat maka *Non Performing Financing* (NPF) menurun, sebab pada saat ekonomi makro meningkat, maka kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*capability to pay-back*) meningkat, sehingga Non Performing Financing (NPF) menurun (Mutmainah & Chasanah, 2012).

H5: Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

6 Pengaruh BI Rate terhadap Non Performing Financing (NPF)

Dampak kenaikan inflasi biasanya direspon BI dengan meningkatkan BI *Rate*. Kenaikan BI *Rate* akan meningkatkan biaya pembiayaan yang berupa nisbah bagi hasil atau margin pembiayaan, sehingga nilai pengeluaran pembiayaan bank syariah turun (Muqorrabin, 2019). Ada kecenderungan nilai BI *Rate* dari tahun 2011 sampai 2017 mengalami penurunan. Keadaan ini akan menurunkan tingkat bunga Bank konvensional, bila Bank Syariah tidak merespon cepat dengan menurunkan nisbah bagi hasil dan margin pembiayaan maka akan mengurangi jumlah pembiayaan mereka. Hal ini akan mengurangi jumlah total pembiayaan sehingga menurunkan risiko bermasalah pada Bank Syariah (Supriani & Sudarsono, 2018).

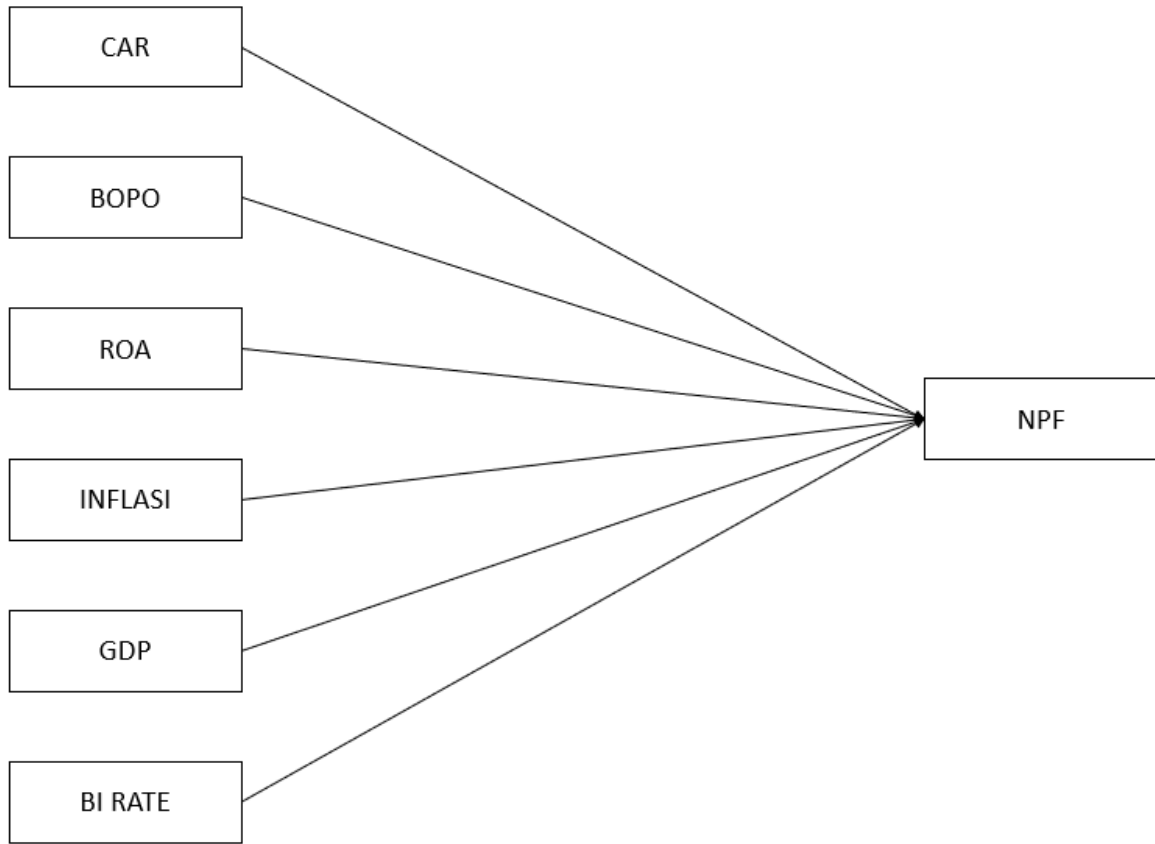
Ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya disebabkan tingginya beban bunga yang ditanggung. Walaupun Perbankan Syariah tidak mengenal

sistem bunga dalam menjalankan operasionalnya, namun secara tidak langsung kenaikan *BI Rate* dijadikan *benchmark* oleh Bank Syariah, selain itu baik Bank Syariah maupun Konvensional tidak dapat menghindari persaingan di industri Perbankan sebagai sesama lembaga bisnis. Tingkat persaingan antara kedua sistem Bank menjadikan kebijakan yang diambil salah satu pihak akan mempengaruhi Perbankan yang lain. Dalam hal ini ketika terjadi kenaikan suku bunga BI maka nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan di Bank Konvensional akan beralih ke Bank Syariah karena tingginya suku bunga di Bank Konvensional. Hal ini akan menyebabkan pembiayaan di Bank Syariah menjadi semakin tinggi dan berpengaruh terhadap potensi rasio NPF yang semakin besar. Begitu juga sebaliknya ketika *BI Rate* turun, maka Perbankan Syariah juga akan menurunkan tingkat marginnya, sehingga margin bagi hasil pada Perbankan Syariah juga akan kompetitif menyesuaikan kondisi pasar dan akan mengurangi pembiayaan bermasalah pada perbankan Syariah itu sendiri (Nugrohowati & Bimo, 2019).

Hal yang sama juga dialami oleh sebuah BPRS dimana merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang dalam menentukan besar kecilnya margin atau bagi hasil pembiayaannya selalu melihat kondisi pasar terkini termasuk tingkat suku bunga Bank Konvensional dan tingkat margin dari Bank Syariah. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar sebuah BPRS dapat terus bersaing dengan kompetitornya.

H6: BI Rate berpengaruh positif terhadap Non performing Financing (NPF).

2.4 Kerangka Berfikir



A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan oleh peneliti merupakan data yang berbentuk angka yang dapat dihitung. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu penelitian yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk angka. Menurut Sugiono (2013) mengartikan penelitian kuantitatif sebagai penelitian yang dilandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel yang pada umumnya diambil secara random, yang pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sedangkan, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan salah satu jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih (Sugiono, 2017). Adapun bentuk hubungannya adalah hubungan klausul, yaitu hubungan sebab akibat yang ditimbulkan karena adanya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

3.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. Jumlah BPRS di Indonesia hingga bulan Mei 2024 adalah sejumlah 173 yang tersebar di seluruh Indonesia. Rentang waktu dari penelitian ini yaitu dari Kuartal pertama tahun 2020 sampai Kuartal empat tahun 2023.

3.3 Data dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Menurut Sugiono (2017) data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder bisa didapatkan dengan melalui media perantara baik dari peneliti-peneliti terdahulu, buku, catatan atau laporan, bukti yang telah ada dan sebagainya

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan data statistik di OJK, website resmi Bank Indonesia dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Populasi dan sampel

Populasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai keseluruhan dari objek yang akan di teliti. Menurut Sugiono (2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi bukanlah hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek maupun objek (Sugiono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah BPRS yang ada di Indonesia yaitu berjumlah 173.

Sampel merupakan bagian kecil dari populasi. Menurut Sugiono (2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh polusi. Sampel yang baik adalah sampel yang jumlahnya mendekati populasi. Dengan jumlah sampel yang mendekati jumlah populasi maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil. Pengambilan sampel yang merupakan bagian dari populasi diharapkan 100% mewakili populasi.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Pengertian dari *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian

dengan beberapa pertimbangan aspek tertentu yang memiliki tujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa menggambarkan hasil penelitian (Sugiyono, 2019). Kriteria dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah BPRS yang laporan keuangannya dirilis pada portal www.ojk.go.id.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Variabel merupakan suatu hal baik berupa sifat, nilai, obyek maupun semacamnya yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau diuji dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2014). Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yakni variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab berubahnya variabel dependen atau variabel terikat. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah Inflasi, GDP, *BI Rate*, CAR, BOPO, dan ROA.

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat dari adanya variabel independent. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikatnya adalah tingkat *Non Performing Financing* KSPPS Tamzis Bina Utama.

3.5.1 NPF (*Non Performing Financing*)

NPF (*Non Performing Financing*), merupakan pembiayaan tidak lancar dimana nasabah mengalami kesulitan dalam mengembalikan pokok pinjaman beserta ujroh, margin atau nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian (akad) (Antonio, 2001)

Untuk mengetahui besarnya tingkat NPF pada suatu lembaga keuangan, Bank Indonesia menginstruksikan dalam Surat Edaran No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang perhitungan rasio keuangan bank, bahwa NPF dirumuskan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3.5.2 Capital Adequacy Rasio (CAR)

CAR (*Capital Adequacy Rasio*) merupakan rasio yang dapat menunjukkan kemampuan suatu lembaga dalam penyediaan dana yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha atau untuk pelindung risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan operasional lembaga tersebut (Greuning and Iqbal, 2011).

Secara sistematis, CAR dapat dirumuskan sebagai berikut

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

3.5.3 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya dengan membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional (Rivai *et al*, 2013)

Secara sistematis BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

3.5.4 Return On Asset (ROA)

ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan semakin baik, karena tingkat kembalian (return) semakin besar. (Harahap, 2013)

ROA dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset} \times 100\%$$

3.5.5 Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan harga dalam suatu perekonomian yang berlangsung lama. Dalam KBBI disebutkan bahwa Inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

Menurut Nanga (2005), terdapat dua jenis inflasi dilihat dari faktor penyebabnya, yaitu:

- 1) Inflasi tarikan permintaan, yaitu inflasi yang terjadi sebab adanya kenaikan permintaan agregat yang terlalu besar.
- 2) Inflasi dorongan biaya, yaitu inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biayaan produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi perusahaan.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Inflasi berdasarkan bobotnya terdiri dari empat tingkatan, yaitu inflasi ringan (dibawah 10% setahun), inflasi sedang (antara 10%-30% setahun), inflasi berat (antara 30%-100%

setahun), dan hiperinflasi (diatas 100% setahun) (Fahmi, 2014). Sementara rumus yang digunakan untuk menghitung inflasi yaitu (Latief, 2019):

$$\text{Inflasi} : \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$

Data inflasi dalam penelitian ini menggunakan data inflasi umum bulanan Indonesia yang diambil dari website Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

3.5.6 Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pertumbuhan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan atau diproduksi oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu dengan menjumlahkan semua output dari warga negara yang bersangkutan ditambah dengan warga negara asing yang bekerja di negara bersangkutan (Putong, 2002). PDB terbagi menjadi dua, yaitu PDB riil dan PDB nominal. PDB riil adalah ukuran yang paling luas yang dapat menggambarkan keseluruhan kondisi perekonomian. Seringkali para ekonom menggunakan PDB riil untuk dapat menggambarkan kemakmuran ekonomi. Hal tersebut dikarenakan mengukur kemakmuran ekonomi yang lebih baik akan menghitung output barang dan jasa perekonomian dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan harga (Mankiw, 2003). PDB dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Kurniawan, 2015):

$$PDB = C + I + G (X - M)$$

Keterangan:

C : Pengeluaran konsumsi barang dan jasa pribadi

I : Investasi

G : Pengeluaran untuk belanja pemerintah baik dari konsumsi maupun investasi

X : Mewakili ekspor

E : Mewakili impor

Data PDB dalam penelitian ini mengambil data yang tersedia di website Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

3.5.7 *BI Rate*

BI Rate atau suku Bunga bank Indonesia merupakan bunga yang ditetapkan oleh bank sentral yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang diumumkan kepada masyarakat umum, dalam hal ini ialah Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia. Sistem perbankan Indonesia masih menggunakan *dual banking system* yaitu bank konvensional dan bank syariah. Suku bunga kredit bank umum akan meningkat apabila *BI Rate* mengalami kenaikan, sehingga dapat berpengaruh terhadap pembiayaan pada bank yaitu meningkatnya pembiayaan bermasalah.

Ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya disebabkan tingginya beban bunga yang ditanggung. Walaupun perbankan syariah tidak mengenal sistem bunga dalam menjalankan operasionalnya, namun secara tidak langsung kenaikan *BI Rate* dijadikan benchmark oleh bank syariah, selain itu baik bank syariah maupun konvensional tidak dapat menghindari persaingan di industri perbankan sebagai sesama lembaga bisnis. Tingkat persaingan antara kedua sistem bank menjadikan kebijakan yang diambil salah satu pihak akan mempengaruhi perbankan yang lain. Dalam hal ini ketika terjadi kenaikan suku bunga *BI* maka nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan di bank konvensional akan beralih ke bank syariah karena tingginya suku bunga di bank konvensional. Hal ini akan menyebabkan pembiayaan di bank syariah akan semakin tinggi dan berpengaruh terhadap rasio NPF yang semakin besar. Begitu juga sebaliknya ketika *BI Rate* turun, maka perbankan konvensional juga

akan menurunkan tingkat suku bunganya, sehingga margin bagi hasil pada BPRS sebagai perbankan Syariah juga akan kompetitif dan akan mengurangi pembiayaan bermasalah pada BPRS itu sendiri (Nugrohowati & Bimo, 2019). Data *BI Rate* Indonesia dapat dilihat pada website resmi Bank Indonesia yaitu pada laman [bi.go.id](https://www.bi.go.id) (<https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/BI-Rate.aspx>).

3.6 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Data Panel. Regresi data panel adalah regresi dengan menggunakan data panel yaitu gabungan data yaitu data *Time Series* dan *Data Crossection*, sedangkan data akan diolah menggunakan aplikasi EViews.

3.7 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul tanpa adanya maksud membuat kesimpulan yang bersifat umum (Sugiono, 2017). Analisis statistik deskriptif dapat dilakukan dengan mendeskriptifkan data dari semua variabel dalam bentuk presentase, distribusi frekuensi, grafik garis maupun batang, diagram lingkaran, histogram, penjelasan kelompok melalui mean, median, modus, dan standar deviasi atau variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku dengan menggunakan software SPSS.

3.8 Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui kenormalan sebuah data. Uji normalitas dilakukan sebelum data dianalisis menggunakan model regresi yang diajukan. Hal ini ditujukan untuk mendeteksi apakah data dari sebuah variabel yang akan dianalisis memberikan distribusi normal atau tidak. Data distribusi yang normal atau mendekati normal dapat membuktikan bahwa model regresi yang diajukan telah baik dan layak (Ghozali, 2018).

Uji yang digunakan untuk melihat normalitas data adalah Uji Kolmogorov-Smirnov dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- (1) Jika nilai signifikannya lebih dari 0.05 atau 5%, maka data berdistribusi normal.
- (2) Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 atau 5%, maka data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk menguji adalah korelasi atau hubungan antar variabel independen. Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi korelasi diantara variabel independen yang akan diteliti (Ghozali, 2018). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas antar variabel independen dapat dilakukan dengan cara memperhatikan angka dari Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Tolerance digunakan untuk mengukur variabel yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut:

- (1) Jika nilai $VIF \leq 10$, maka model regresi bebas dari multikolinearitas.

(2) Jika nilai Tolerance $\geq 0,1$, maka model regresi bebas dari multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan uji yang dilakukan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heterokedastisitas pada data yang diuji. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan Uji Glejser. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, dan sebaliknya jika nilai signifikansi kurang dari 5% maka terjadi heteroskedastisitas.

3.9 Uji Pemilihan Model Data Panel

Regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga model regresi data panel dengan tujuan untuk memperoleh model yang paling tepat yang akan digunakan. Ketiga model regresi tersebut adalah, regresi dengan koefisien tetap antar waktu dan individu (*Common Effect*), slope konstan tetapi intersep berbeda antara individu (*Fixed Effect*), dan regresi dengan pendekatan *Random Effect*. Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah melakukan regresi data panel dengan ketiga model regresi di atas adalah memilih model yang paling tepat untuk digunakan. Dalam memilih model mana yang akan digunakan maka perlu dilakukan tiga uji. Yaitu uji F (*Chow Test*) uji ini dilakukan untuk memilih antara model *Common Effect* atau *Fixed Effect*, uji *langrange multiplier* (LM test) uji ini dilakukan untuk memilih anarata

model *Common Effect* atau *Random Effect* , uji *Hausman*, uji ini dilakukan untuk memilih anarata model *Fixed Effect* atau *Random Effect*.

Adapun rumus yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

$$NPF = a + b_1CAR + b_2BOPO + b_3ROA + b_4INF + b_5GDP + b_6RATE + e$$

Keterangan :

NPF : Risiko Pembiayaan (Non Performing Financing / NPF)

a : Nilai Konstanta

b : Koefisien Regresi

CAR : Permodalan (CAR)

BOPO : Efisiensi (BOPO)

ROA : Kinerja (ROA)

INF : Inflasi

GDP : GDP

RATE : BI Rate

e : Standar Error

3.9.1 Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *common effect* dan *fixed effect*. Hipotesis pada Uji chow adalah sebagai berikut:

H₀ : Common Effect

H_a : Fixed Effect

Kriteria:

Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ maka H_0 diterima

Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ maka H_a diterima

3.9.2 Uji Hausman

Uji Hausman ini dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih antara *random effect* dan *fixed effect*. Hipotesis pada Uji hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Kriteria:

Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ maka H_0 diterima

Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ maka H_a diterima

3.9.3 Lagrange Multiplier-Test

Setelah *chow-test* dan *hausman-test* telah dijalankan maka tahap pemilihan model adalah uji *lagrange multiplier*. Kriterianya apabila probabilitas *Breusch-Pagan* lebih besar dari 0,05 maka model *common effect* digunakan. Namun, apabila nilai probabilitas *Breusch-Pagan* lebih kecil dari 0,05, maka menggunakan pendekatan *random effect*.

3.10 Uji Hipotesis

3.10.1 Uji Koefisien Determinasi (R squared)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel independen memberikan hampir

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Nilai koefisien determinasi (R^2) mempunyai Range antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Semakin besar nilai R^2 atau mendekati satu, maka semakin baik hasil regresi tersebut, yang juga bermakna jika variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Namun sebaliknya, jika semakin kecil atau mendekati nol (0) berarti variabel independen tidak bisa menjelaskan variabel dependen.

3.10.2 Uji Signifikansi Simultan (F-statistik)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan kesimpulan bahwa variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen sebanyak 5%. Sedangkan jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka secara bersama-sama semua variabel independen memengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai 0,05 (untuk tingkat signifikansi 5%), maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar daripada nilai 0,05 maka variabel independen secara bersama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a : Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Dasar dari pengambilan keputusan hipotesis adalah:

Jika nilai Signifikansi $> 0,05$ maka nilai H_0 diterima

Jika nilai Signifikansi $< 0,05$ maka nilai H_a diterima

3.10.3 Uji Signifikansi Parsial (T-statistik)

Uji T digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual atau parsial. Untuk pengujian Uji t, peneliti melakukan dengan tingkat signifikansi yang dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$. Dalam pengambilan kesimpulan Uji t dilakukan dengan melihat nilai dari signifikansi hasil pada variabel independen dengan kriteria sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka nilai H_0 diterima

Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka nilai H_a diterima

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai mean (rata-rata), dan standar deviasi dari variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang terdiri dari data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* dalam penelitian ini yaitu 75 (tujuh puluh lima) BPRS di Indonesia dan data *time series* meliputi CAR (*Capital Adequacy Rasio*), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), ROA (*Return On Asset*), Inflasi, PDB (Produk Domestik Bruto), BI *rate* pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Hasil statistik deskriptif bisa dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	NPF	CAR	BOPO	ROA	PDB	RATE	INF
Mean	7.419000	11.93714	81.45079	2.561425	2865919.	4.406250	2.876250
Median	5.605000	9.520000	83.50000	2.110000	2832695.	4.125000	2.445000
Maximum	38.72000	39.85000	99.70000	22.00000	3139085.	6.000000	5.950000
Minimum	0.010000	2.540000	10.64000	0.010000	2589769.	3.500000	1.330000
Std. Dev.	6.373633	8.284966	12.68210	2.389289	162247.1	0.960035	1.490927
Observations	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200

Berdasarkan hasil pada tabel 4.1 dapat dilihat nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dari 75 BPRS di Indonesia selama kurun waktu 2020 sampai 2023. Variabel BOPO memiliki nilai minimum 10.64 dan nilai maksimum 99.70. Mean variabel BOPO menunjukkan angka 81.45 dan standar deviasi 12.68.

Pada variabel ROA nilai minimum menunjukkan hasil 0.01 dan nilai maksimum 22.00. Mean variabel ROA 2.56 dengan standar deviasi 2.38.

Nilai minimum variabel CAR menunjukkan angka 2.54 dan nilai maksimum 39.85. Standar deviasi CAR adalah 8.28 sementara nilai meannya 11.93.

Kemudian untuk variabel PDB memiliki nilai minimum 2589769.20 dan maksimum 3139084.50. Nilai rata-rata variabel PDB adalah 2865919 dan standar deviasi 162247.1.

Variabel BI rate menunjukkan nilai minimum 3.50 dan nilai maksimum 6.00. Nilai mean dari variabel BI rate adalah 4.40 dengan standar deviasi 0.96. Nilai mean yang lebih tinggi dari standar deviasi menunjukkan bahwa sebaran data variabel BI rate kecil dan tidak ada kesenjangan data yang besar.

Variabel inflasi memiliki nilai minimum 1.33 dan nilai maksimum 5.95. Rata-rata dari variabel inflasi adalah 2.87 dan standar deviasi 1.49.

Variabel NPF memiliki nilai minimum 0.01 dan nilai maksimum 38.72. Standar deviasi variabel NPF 6.37 dan nilai mean 7.41.

4.2 Pemilihan Model Data Panel

4.2.1 *Chow Test*

Chow-test digunakan untuk menentukan model *fixed effect* atau *common effect* yang paling tepat untuk memperkirakan data panel. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 model *common effect* digunakan. Namun, jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka *fixed effect* digunakan. Hasil *chow-test* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Chow-test

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.459264	(74,1119)	0.0000
Cross-section Chi-square	426.818866	74	0.0000

Berdasarkan *chow-test* pada tabel 4.2 di atas menunjukkan probabilitas cross section $F 0,0000 < 0,05$. Dengan demikian model *fixed effect* yang tepat digunakan dibandingkan dengan *common effect* untuk mengestimasi data panel dalam penelitian ini.

4.2.2 Hausman-Test

Setelah menjalankan uji *chow-test* dan mendapatkan hasil menggunakan model *fixed effect* selanjutnya dilakukan uji *hausman-test* untuk membandingkan kembali model data panel antara *fixed effect* dan *random effect*. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka *random effect* digunakan. Namun, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka menggunakan *fixed effect*. Hasil Hausman-Test dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hausman-Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	6	1.0000

Berdasarkan hausman-test pada tabel 4.3 di atas menunjukkan nilai probabilitas $1.000 > 0.05$. Dengan demikian model *Random effect* yang tepat digunakan dibandingkan dengan *Fixed effect* untuk mengestimasi data panel pada model dalam penelitian ini.

4.2.3. Lagrange Multiplier-Test

Setelah *chow-test* dan *hausman-test* telah dijalankan maka tahap pemilihan model adalah dengan uji *lagrange multiplier*. Kriterianya apabila probabilitas *Breusch-Pagan* lebih besar dari 0,05 maka model *common effect* digunakan. Namun, apabila

nilai probabilitas *Breusch-Pagan* lebih kecil dari 0,05, maka menggunakan pendekatan *random effect*. Hasil *lagrange multiplier-test* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Lagrange Multiplier-Test

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	529.4767 (0.0000)	2.753294 (0.0971)	532.2300 (0.0000)

Hasil *lagrange multiplier-test* pada tabel 4.4 di atas menunjukkan nilai probabilitas *Breusch-Pagan* $0.000 < 0.05$ dengan demikian model *random effect* yang tepat digunakan untuk mengestimasi data panel pada penelitian ini.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R squared)

Koefisien determinasi adalah sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model regresi menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ini mencerminkan seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.5 Uji Koefisien Determinasi (R squared)

Weighted Statistics			
R-squared	0.063384	Mean dependent var	3.035505
Adjusted R-squared	0.058673	S.D. dependent var	5.428558
S.E. of regression	5.266896	Sum squared resid	33094.05
F-statistic	13.45567	Durbin-Watson stat	1.438453
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil output tabel 4.5 diatas, nilai R Square menunjukkan angka 0,063 atau 6,3 %. Hal ini memiliki arti bahwa variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 6,3 %. Sedangkan

sisanya (100 % - 6,3 %) sejumlah 93,7 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4.3.2 Uji F

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau variabel bebas di dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Menurut Ghozali (2021) uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen.

Tabel 4.6 Uji F

F-statistic	13.45567
Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikan adalah 0,000 dimana nilai tersebut menunjukkan hasil $< 0,05$ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel independen (BOPO, CAR, ROA, PDB, Inflasi, dan BI Rate) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu NPF.

4.3.2 Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh dampak satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen.

Tabel 4.7 Analisis Regresi Berganda

Dependent Variable: NPF
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/24/24 Time: 19:35
 Sample: 2020Q1 2023Q4
 Periods included: 16
 Cross-sections included: 75
 Total panel (balanced) observations: 1200
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.239988	3.688478	-0.336179	0.7368
CAR	0.110896	0.022055	5.028189	0.0000
BOPO	0.085915	0.014812	5.800169	0.0000
ROA	0.193422	0.075514	2.561415	0.0105
PDB	-1.16E-06	1.43E-06	-0.811607	0.4172
RATE	0.812842	0.230662	3.523948	0.0004
INF	-0.143113	0.119855	-1.194048	0.2327

Berdasarkan hasil pada tabel 4.7 diatas didapat persamaan

$$\text{NPF} = -1.239988 + 0.110896 \text{ CAR} + 0.085915 \text{ BOPO} + 0.193422 \text{ ROA} - 1.16\text{E-}06 \text{ PDB} + 0.812842 \text{ RATE} - 0.143113 \text{ INF}$$

Ketika semua variabel independen (BOPO, ROA, CAR, PDB, BI rate, dan Inflasi) bernilai nol, nilai NPF (*Non-Performing Financing*) diperkirakan adalah -1.239. Setiap kenaikan satu unit dalam BOPO berhubungan dengan peningkatan NPF sebesar 0.085 dengan asumsi variabel yang lain tetap atau konstan. Peningkatan satu unit dalam ROA berhubungan dengan peningkatan NPF sebesar 0.193 dengan asumsi variabel yang lain tetap atau konstan. Setiap kenaikan satu unit dalam CAR berhubungan dengan peningkatan NPF sebesar 0.110 dengan asumsi variabel yang lain tetap atau konstan. Setiap kenaikan satu unit dalam PDB berhubungan dengan penurunan NPF sebesar 1.16E-06 (0.00000116) dengan asumsi variabel yang lain tetap atau konstan. Peningkatan satu unit dalam BI Rate berhubungan dengan peningkatan NPF sebesar 0.812 dengan asumsi variabel yang lain tetap atau konstan. Dan setiap

kenaikan satu unit dalam inflasi berhubungan dengan penurunan NPF sebesar 0.143 dengan asumsi variabel yang lain tetap atau konstan.

Nilai signifikansi variabel BOPO, ROA, CAR, dan BI Rate dibawah 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia. Sementara itu variabel inflasi dan PDB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia karena memiliki nilai signifikansi diatas 0,05. Variabel BOPO, ROA, CAR, dan BI rate memiliki hubungan positif dengan NPF, menunjukkan bahwa peningkatan dalam variabel ini dapat menyebabkan peningkatan pinjaman yang bermasalah. Sebaliknya, PDB dan inflasi menunjukkan hubungan negatif, yang berarti pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi NPF.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh ROA terhadap NPF

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel ROA menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap NPF. Nilai signifikansi variabel ROA adalah $0,0105 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H1 diterima. Setiap peningkatan satu unit dalam ROA berhubungan dengan peningkatan NPF sebesar 0.193 dengan asumsi variabel yang lain tetap atau konstan. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Putra & Syaichu (2021) dimana variabel ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF pada Perusahaan Perbankan Syariah yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai dengan 2019.

Faktor internal perbankan, termasuk profitabilitas seperti ROA, dapat mempengaruhi risiko kredit atau NPL. ROA yang lebih tinggi dapat mengindikasikan kinerja keuangan bank yang membaik, namun dalam beberapa kasus hal ini juga dapat mendorong praktik pemberian pinjaman yang lebih berisiko, sehingga berpotensi meningkatkan NPL. Lembaga keuangan sangat mungkin untuk mengambil beberapa

langkah untuk memperluas portofolio kredit dengan menawarkan lebih banyak pinjaman. Termasuk juga dalam sebuah BPRS yang mana dengan penambahan angka *Outstanding* pembiayaan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan / return dari bagi hasil ataupun margin dan ujhoh. Namun, jika penambahan jumlah pembiayaan ini tidak diimbangi dengan analisis yang baik sangat berpotensi menjadi pembiayaan yang kurang baik atau bahkan macet. Penyaluran pembiayaan yang kurang selektif ini bisa membuat angka NPF sebuah BPRS berpotensi meningkat.

ROA (*Return on Assets*) yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Namun, jika NPF (*Non-Performing Finance*) juga tinggi, itu bisa mengindikasikan masalah dalam kualitas pembiayaan yang diberikan oleh BPRS. Kualitas pembiayaan erat kaitannya dengan proses awal survey kelayakan pemberian pembiayaan dan juga proses setelah realisasi pembiayaan yaitu proses evaluasi dan *maintenance*. Risiko kredit tidak selalu muncul akibat kurangnya proses dalam survey awal, namun juga bisa terjadi akibat kurangnya evaluasi sebuah perbankan terhadap nasabah kredit mereka. Evaluasi ini mengharuskan sebuah perbankan secara temporer melakukan pemantauan guna memperoleh informasi terkini kondisi nasabah kredit yang berkaitan dengan kemampuan bayar mereka. Bagi nasabah pelaku usaha, Bank harus jeli apakah usaha mereka berjalan dengan lancar atau terdapat kendala sehingga dapat menghambat pembayaran angsuran. Juga bagi nasabah lain yang bukan pelaku usaha, apakah terdapat pengurangan penghasilan bulanan yang berakibat kurangnya kemampuan bayar mereka terhadap angsuran bank. Jika proses evaluasi ini tidak mampu dijalankan, akan sangat sulit bagi perbankan untuk menahan laju kredit macet di seluruh portofolio kredit mereka dikarenakan keterlambatan bank dalam melakukan evaluasi terhadap nasabah-nasabah yang berpotensi menambah angka NPF Bank. Di saat Bank mampu meningkatkan laba dalam suatu periode, tidak

menutup kemungkinan Bank juga mengalami kenaikan laju NPF pada periode yang sama atas kurangnya maintenance terhadap portofolio kreditnya.

4.4.2 Pengaruh BOPO terhadap NPF

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel BOPO menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap NPF. Nilai signifikansi variabel BOPO adalah $0.000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H2 diterima. Setiap kenaikan satu unit dalam BOPO berhubungan dengan peningkatan NPF sebesar 0.085 dengan asumsi variabel yang lain tetap atau konstan. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Nugrohowati & Bimo (2019) yang menyatakan variabel BOPO berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap NPF BPRS di Indonesia selama kurun waktu 2012 sampai 2017.

Ketika rasio BOPO tinggi, akan berakibat pada profitabilitas Bank yang akan menurun termasuk juga pada sebuah BPRS. Ini berarti BPRS akan memiliki lebih sedikit cadangan untuk mengatasi kerugian salah satunya kerugian akibat dari pinjaman yang tidak lancar (risiko kredit). Dengan menjaga profitabilitas, BPRS juga dapat lebih leluasa berinvestasi dalam sistem manajemen risiko yang lebih baik. Jika rasio BOPO tinggi, hal ini akan sedikit terabaikan sehingga akan meningkatkan risiko kredit BPRS.

Sebuah Lembaga Keuangan termasuk BPRS yang mengalami keadaan dimana biaya operasionalnya tinggi, akan cenderung memberi pinjaman tanpa melakukan analisis risiko yang mendalam, seakan terburu-buru dalam memberikan pembiayaan yang diharapkan akan segera menghasilkan pendapatan, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya NPF. Bank dengan profitabilitas yang tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam analisa pemberian kredit dengan benar-benar memastikan kualitas pinjaman. Jika biaya operasional tinggi, BPRS perlu

meningkatkan pendapatannya dan akan memperluas pemberian pembiayaan yang sangat memungkinkan dengan analisis yang kurang mendalam.

Penurunan pendapatan operasional BPRS yang mengakibatkan naiknya rasio BOPO juga akan berdampak pada kemampuan BPRS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan. Ketika pendapatan menurun, Bank tidak memiliki cukup sumber daya untuk memberikan restrukturisasi yang diperlukan bagi nasabah yang mengalami kesulitan, seperti perpanjangan tenor dan penurunan suku bunga pinjaman atau lebih dikenal dengan margin/ujroh/bagi hasil di Lembaga Keuangan Syariah seperti BPRS. Tanpa adanya opsi restrukturisasi, nasabah yang kesulitan mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka, sehingga akan cenderung terjebak dalam status NPF atau macet. Ketidakmampuan BPRS untuk segera memberikan solusi dapat membuat masalah NPF semakin parah.

4.4.3 Pengaruh CAR terhadap NPF

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel CAR menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap NPF. Nilai signifikansi variabel CAR adalah $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H3 diterima. Setiap kenaikan satu unit dalam CAR berhubungan dengan peningkatan NPF sebesar 0.110 dengan asumsi variabel yang lain tetap atau konstan. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Supriani (2018) dimana variabel CAR memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap NPF Bank Syariah selama 2011 sampai dengan 2017.

Bank dengan CAR yang tinggi secara psikologis akan merasa lebih aman dalam mengambil keputusan terkait pemberian kredit. Bank mungkin akan kurang mempertimbangkan beberapa aspek atas risiko peminjam, dan lebih memperhatikan volume kredit yang diberikan ketimbang kualitas pinjaman yang pada akhirnya dapat

menyebabkan peningkatan gagal bayar atau NPF. Semakin ketatnya persaingan antar lembaga keuangan dan juga sulitnya pengembangan wilayah potensial pembiayaan membuat BPRS terpaksa melakukan ekspansi agresif dalam pemberian pembiayaan. Sektor-sektor usaha yang dulunya dianggap terlalu berisiko akan mulai dimasuki sebagai salah satu langkah perluasan penyerapan pembiayaan.

Di sisi lain modal yang tidak digunakan secara optimal dapat mengurangi efisiensi operasional bank. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan produktif menjadi tidak menghasilkan imbal hasil yang maksimal. Modal yang dimiliki oleh BPRS mempunyai *cost of equity* yang harus dipertimbangkan dalam operasional BPRS. Mengelola biaya modal secara efektif sangat penting bagi Bank termasuk juga BPRS, karena berpengaruh langsung pada profitabilitas dan kelangsungan usaha. BPRS harus memastikan bahwa imbal hasil dari investasi dan operasi melebihi biaya modal untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Pendapatan operasional BPRS sebagian besar didapat dari pendapatan margin pembiayaan. Untuk meningkatkan pendapatan operasional secara cepat, BPRS akan cenderung berupaya meningkatkan *selling* terhadap produk pembiayaan mereka pada bulan berjalan dengan harapan dibulan berikutnya sudah akan menghasilkan pendapatan. Sementara itu nasabah-nasabah pembiayaan BPRS tentu memiliki karakter dan juga kondisi keuangan masing-masing yang mempengaruhi kualitas pengembalian pembiayaan mereka. Terkadang ada beberapa nasabah yang sudah mulai terlihat akan berpotensi mengalami gagal bayar di pembiayaan pertama mereka. Namun terkadang ada juga nasabah yang mempunyai riwayat pembiayaan bagus di periode sebelumnya tetapi untuk periode tertentu mengalami kendala dan akhirnya menjadi nasabah gagal bayar atau NPF. Hal ini menjadi penyebab mengapa saat posisi rasio CAR BPRS tinggi, bisa menyebabkan rasio NPF juga akan meningkat. Portofolio pembiayaan BPRS adalah gambaran

nasabah secara umum dan merupakan hasil kinerja para petugas surveyor atau analis BPRS yang tentu memiliki karakter dan kompetensi yang berbeda-beda saat melakukan uji kelayakan pemberian pembiayaan.

4.4.4 Pengaruh Inflasi terhadap NPF

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Nilai signifikansi variabel Inflasi adalah $0,073 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa H4 ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Rofi'ah (2019) dimana hasil penelitian menunjukkan variabel Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia.

Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam periode waktu tertentu. Inflasi yang tinggi membuat perencanaan ekonomi lebih sulit bagi bisnis dan individu, karena mereka tidak bisa memprediksi dengan pasti bagaimana harga akan berubah di masa depan. Namun, tidak adanya pengaruh inflasi terhadap NPF dikarenakan pengusaha atau produsen barang bisa menaikkan harga produk mereka untuk menyesuaikan dengan inflasi. Jika permintaan tetap tinggi, mereka bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan margin keuntungan. Kemudian perusahaan yang berhutang (debitur) akan diuntungkan saat inflasi karena nilai hutang mereka menjadi lebih rendah dalam hal daya beli. Mereka akan membayar kembali pinjaman dengan nilai nominal yang sama, tetapi uang yang mereka kembalikan memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan saat mereka meminjam.

Ketika harga barang dan jasa naik akibat inflasi, masyarakat akan membutuhkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang sama. Jika pendapatan mereka tidak meningkat seiring dengan inflasi, daya beli mereka akan menurun. Harga kebutuhan

pokok masyarakat seperti makanan, listrik, dan transportasi naik, mereka mungkin harus mengurangi pembelian barang-barang yang kurang esensial seperti hiburan, pakaian, atau gadget. Maka dapat disimpulkan bahwa saat inflasi meningkat, masyarakat cenderung akan mengurangi pengeluaran yang bersifat konsumtif, namun tidak mengurangi tanggung jawabnya dalam memenuhi pembayaran kewajiban angsuran perbankan sehingga tidak berpengaruh terhadap rasio NPF Bank.

Selama kurun waktu penelitian antara tahun 2020 sampai dengan 2023 nilai rasio NPF dan laju inflasi tidak terjadi keterpautan angka yang tinggi selama periode penelitian. Saat memasuki masa pandemi Covid -19, melalui kebijakan-kebijakan yang diberikan, pemerintah dapat menjaga laju inflasi sehingga mengurangi terjadinya resiko kredit bermasalah di perbankan. Hal itu dibuktikan dengan hasil data pada triwulan I-III periode 2020 inflasi tertinggi pun masih tergolong ringan hanya mencapai 2,96%. Inflasi tersebut memang dapat merugikan pihak perbankan, namun karena inflasi yang terjadi masih tergolong ringan perubahan inflasi tersebut masih bisa diatasi dan tidak akan mempengaruhi stabilitas keuangan perbankan terutama pada kredit bermasalah.

4.4.5 Pengaruh GDP (PDB) terhadap NPF

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel PDB tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap NPF. Nilai signifikansi variabel PDB adalah $0.417 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_5 ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Asmara (2019) dan Yuniarti *et al* (2022) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB tidak berpengaruh terhadap NPF di Bank Umum Syariah di Indonesia.

Produk Domestik Bruto merupakan peningkatan taraf pendapatan masyarakat pada suatu wilayah atau kawasan tertentu. Saat terjadi pertumbuhan PDB, manfaat dan pengaruhnya mungkin belum bisa terdistribusi secara menyeluruh

pada semua masyarakat. Ketidakmerataan ini dapat memengaruhi kemampuan sebagian masyarakat atau sektor usaha untuk memenuhi kewajiban finansial mereka. Juga terkait adanya pertumbuhan PDB karena dominasi sektor-sektor tertentu yang tidak secara langsung berkaitan dengan kredit atau pembiayaan (misalnya sektor ekspor impor dan industri skala besar) akan berdampak kecil terhadap NPF.

Kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki dampak yang luas bagi masyarakat, tergantung pada bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut terdistribusi dan dimanfaatkan. Kenaikan PDB sering kali mencerminkan peningkatan output ekonomi, yang dapat meningkatkan pendapatan individu dan rumah tangga. Kemudian masyarakat akan memiliki daya beli yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tidak adanya hubungan signifikan antara PDB dan NPF mencerminkan bahwa efek pertumbuhan ekonomi tidak dapat secara langsung (jangka pendek) dirasakan oleh masyarakat luas. Diperlukan waktu lebih lama agar pertumbuhan PDB mampu merubah kondisi ekonomi dan mempengaruhi kualitas pembiayaan Perbankan. PDB juga merepresentasikan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi pengaruhnya terhadap kualitas pembiayaan masyarakat cenderung bersifat tidak langsung. Faktor-faktor seperti tingkat pendapatan masyarakat, lapangan kerja, dan stabilitas sektor keuangan memiliki pengaruh lebih langsung terhadap NPF maupun NPL Perbankan.

4.4.6 Pengaruh BI Rate terhadap NPF

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel BI Rate menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap NPF. Nilai signifikansi variabel BI Rate adalah $0,0004 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_6 diterima. Peningkatan satu unit dalam BI Rate berhubungan dengan peningkatan NPF sebesar 0.812 dengan asumsi variabel yang lain

tetap atau konstan. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Sanusi *et al* (2019) yang melakukan penelitian terhadap Lembaga Keuangan Syariah pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2019 dimana hasil penelitian menyatakan variabel BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF.

BI rate, sebagai suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, berperan dalam menentukan suku bunga kredit dan simpanan di perbankan. BI rate juga mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, seperti resesi, tingkat NPF cenderung meningkat. Suku bunga yang tinggi bisa memperburuk kondisi ini dan meningkatkan risiko gagal bayar. Oleh karenanya Bank perlu mengelola risiko kredit dengan lebih baik.

Dengan suku bunga yang berubah-ubah, strategi manajemen risiko harus disesuaikan untuk mengantisipasi dampak terhadap NPF. Penelitian ini menggunakan data penelitian antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dimana pada periode tahun tersebut terdapat kejadian luar biasa yaitu Pandemi Covid 19 yang juga memiliki pengaruh terhadap perekonomian secara global. Bank Indonesia (BI) menurunkan BI Rate beberapa kali sebagai respons terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi. Pada awal 2020, BI Rate berada di 5,00%, dan kemudian diturunkan menjadi 3,75% pada November 2020. Setelah penurunan BI Rate selama pandemi Covid-19, Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunga pada tahun 2022, yang sering disebut era *new normal*, sebagai respon terhadap meningkatnya inflasi dan kondisi ekonomi global yang berubah serta untuk menjaga stabilitas perekonomian. Namun ada beberapa industri yang memerlukan waktu lebih lama untuk pulih sepenuhnya setelah wabah Covid-19. Sehingga saat BI Rate mulai dinaikkan, industri yang masih berjuang untuk pulih mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan yang terjangkau untuk operasional dan investasi. Bagi industri yang sudah memiliki kewajiban atau

hutang di Bank, kenaikan suku bunga berarti akan meningkatkan biaya pinjaman. Bagi industri yang bergantung pada hutang untuk mendanai operasional, kenaikan suku bunga akan meningkatkan beban biaya yang dapat mengurangi profitabilitas. Hal ini pada akhirnya akan menjadi pemicu menurunnya kemampuan angsur sehingga akan berpotensi meningkatkan NPF atau kredit macet.

Saat BI rate naik, biaya pinjaman bagi bank juga akan meningkat. Bank tentu akan menaikkan suku bunga kredit untuk menjaga margin keuntungan. Dengan naiknya jumlah angsuran yang dibayarkan dapat menyebabkan nasabah kesulitan untuk membayar angsuran tepat jumlah dan juga tepat waktu, sehingga potensi NPF meningkat akan semakin besar. Walaupun sebuah BPRS yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah tidak mengenal sistem bunga kredit, kenaikan BI rate akan dijadikan acuan oleh BPRS dalam menentukan margin pembiayaannya. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi persaingan antar Lembaga Keuangan, dimana saat Lembaga Keuangan Konvensional menaikkan bunga kredit akan diikuti dengan kenaikan margin pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga dampak kenaikan angsuran akibat perubahan suku bunga juga akan dialami oleh BPRS yang berpotensi juga meningkatkan NPF BPRS.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dalam upaya mengetahui dampak atau pengaruh faktor internal dan juga faktor eksternal terhadap risiko pembiayaan pada BPRS di Indonesia. Faktor internal bank menggunakan variabel CAR, BOPO dan ROA. Kemudian untuk faktor eksternal menggunakan variabel Inflasi, PDB dan BI *Rate*. Risiko pembiayaan pada BPRS diukur menggunakan rasio pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Finance*). Berdasarkan hasil penelitian dan juga analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel ROA menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap NPF. ROA yang lebih tinggi dapat mengindikasikan kinerja keuangan bank yang membaik, namun dalam beberapa kasus hal ini juga dapat mendorong praktik pemberian pinjaman yang lebih berisiko, sehingga berpotensi meningkatkan NPF. ROA (*Return on Assets*) yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Namun, jika NPF (*Non-Performing Finance*) juga tinggi, itu bisa mengindikasikan masalah dalam kualitas pembiayaan yang diberikan oleh BPRS.
2. Variabel BOPO menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap NPF. Ketika rasio BOPO tinggi, akan berakibat pada profitabilitas Bank yang akan menurun termasuk juga pada sebuah BPRS. Ini berarti BPRS akan memiliki lebih sedikit cadangan untuk mengatasi kerugian salah satunya kerugian akibat dari pinjaman yang tidak lancar (risiko kredit). Dengan menjaga profitabilitas, BPRS juga dapat lebih leluasa berinvestasi dalam

sistem manajemen risiko yang lebih baik. Penurunan pendapatan operasional BPRS yang mengakibatkan naiknya rasio BOPO juga akan berdampak pada kemampuan BPRS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan. Ketika pendapatan menurun, Bank tidak memiliki cukup sumber daya untuk memberikan restrukturisasi yang diperlukan bagi nasabah yang mengalami kesulitan, seperti perpanjangan tenor dan penurunan suku bunga pinjaman atau lebih dikenal dengan margin/ujroh/bagi hasil di Lembaga Keuangan Syariah.

3. Variabel CAR menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap NPF. Bank dengan CAR yang tinggi secara psikologis akan merasa lebih aman dalam mengambil keputusan terkait pemberian kredit. Bank mungkin akan kurang mempertimbangkan beberapa aspek atas risiko peminjam, dan lebih memperhatikan volume kredit yang diberikan ketimbang kualitas pinjaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan gagal bayar atau NPF. Di sisi lain modal yang tidak digunakan secara optimal dapat mengurangi efisiensi operasional bank. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan produktif menjadi tidak menghasilkan imbal hasil yang maksimal. Modal yang dimiliki oleh BPRS mempunyai *cost of equity* yang harus dipertimbangkan dalam operasional BPRS. Mengelola biaya modal secara efektif sangat penting bagi Bank termasuk juga BPRS, karena berpengaruh langsung pada profitabilitas dan kelangsungan usaha.
4. Variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Tidak adanya pengaruh inflasi terhadap NPF dikarenakan pengusaha atau produsen barang bisa menaikkan harga produk mereka untuk menyesuaikan dengan inflasi. Jika permintaan tetap tinggi, mereka bisa mempertahankan atau

bahkan meningkatkan margin keuntungan. saat inflasi meningkat, masyarakat cenderung akan mengurangi pengeluaran yang bersifat konsumtif, namun tidak mengurangi tanggung jawabnya dalam memenuhi pembayaran kewajiban angsuran perbankan sehingga tidak berpengaruh terhadap rasio NPF Bank.

5. Variabel PDB tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap NPF. Produk Domestik Bruto merupakan peningkatan taraf pendapatan masyarakat pada suatu wilayah atau kawasan tertentu. Saat terjadi pertumbuhan PDB, manfaat dan pengaruhnya mungkin belum bisa terdistribusi secara menyeluruh pada semua masyarakat. Tidak adanya hubungan signifikan antara PDB dan NPF mencerminkan bahwa efek pertumbuhan ekonomi tidak dapat secara langsung (jangka pendek) dirasakan oleh masyarakat luas. Diperlukan waktu lebih lama agar pertumbuhan PDB mampu merubah kondisi ekonomi dan mempengaruhi kualitas pembiayaan Perbankan.
6. Variabel BI Rate menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap NPF. BI rate, sebagai suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, berperan dalam menentukan suku bunga kredit dan simpanan di perbankan. BI rate juga mencerminkan kondisi ekonomi suatu negara. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, seperti resesi, tingkat NPF cenderung meningkat. Suku bunga yang tinggi bisa memperburuk kondisi ini dan meningkatkan risiko gagal bayar. Penelitian ini menggunakan data penelitian antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dimana pada periode tahun tersebut terdapat kejadian luar biasa yaitu Pandemi Covid 19 yang juga memiliki pengaruh terhadap perekonomian secara global. Ada

beberapa industri yang memerlukan waktu lebih lama untuk pulih sepenuhnya setelah wabah Covid-19.

7. Berdasarkan hasil uji f, dapat dilihat bahwa nilai signifikan adalah 0,000 dimana nilai tersebut menunjukkan hasil $< 0,05$ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel independen (BOPO, CAR, ROA, PDB, Inflasi, dan BI Rate) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu NPF.
8. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, nilai R Square menunjukkan angka 0,063 atau 6,3 %. Hal ini memiliki arti bahwa variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 6,3 %. Sedangkan sisanya (100 % - 6,3 %) sejumlah 93,7 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

5.2 Saran

Bagi penelitian selanjutnya bisa menggunakan data periode waktu yang lebih panjang dan juga terkini agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Adanya wabah Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 juga tentu memberikan pengaruh terhadap strategi dan juga kebijakan dari Perbankan maupun otoritas terkait agar mampu bertahan di tengah krisis. Hal ini membuat kinerja sebuah Bank akan menjadi berbeda. Masih banyak variabel yang bisa memengaruhi NPF tetapi tidak digunakan dalam penelitian ini, baik itu variabel internal Bank maupun variabel eksternal. Diharapkan dari penambahan variabel lain tersebut dapat membuat penelitian yang dilakukan kedepannya bisa lebih menjelaskan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi NPF.

Daftar Pustaka

- Agustiningsih (2017). Pengaruh Inflasi, Financing To Deposit Ratio (Fdr), Ratio Financing (Rf) Dan Ratio Return (Rr) Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Pt.Bank Bri Syariah Periode Tahun 2009 Sampai 2015. *Jom Fekon*. Vol. 4 No.1,326-337.
- Akbar, Dinnul Alfian. (2016). Inflasi, Gross Domesctic Product (Gdp), Capital Adequacy Ratio (Car), Dan Finance To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *I-Economic*. Vol. 2. No.2, 19-37.
- Amelia, Elsa Ayu. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Inflasi dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2017. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*. Vol. 8, No. 1. 12-28.
- Amir, Md. Khaled Bin. (2020). Does Excess Bank Liquidity Impact Non-Performing Loan? A Study on Bangladeshi Economy. MPRA Paper No. 101150.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2008). Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan: Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. (2001). Bank Syariah dari teori ke praktik. PT. Gema Insani.
- Asmara, K. (2019). Analisis Faktor Internal dan Eksternal terhadap Non Performance Financing (NPF) Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 4(1), 21-34.
- Azizah, Z., Barnas, B. and Hadiani, F. (2022). Analisis Pengaruh CAR, FDR, ROA, dan Inflasi Terhadap Non Performing Financing pada Bank Muamalat Indonesia. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 2(2). pp.387-398.
- Azkia, G.N., Amirullah, M. and Mumtahaen, I., 2023. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Financing To Deposit Ratio (Fdr) Dan Non Performing Finance (Npf) Terhadap Pembiayaan Akad Murahabah Di BPRS (Studi Pada BPRS Indonesia Periode 2016-2022). *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(4), pp.575-585
- Bahagia, R. and Ridwan, R. (2022). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* 3(1). pp.97-107.
- Benny, Alexandri., Moh., Iman Santoso, Teguh. (2015). Non Performing Loan: Impact of Internal and External Factor (Evidence in Indonesia), *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, Volume 4 Issue 1,87-91
- Bhattarai, Seema. (2015). Determinants of Non-Performing Loan in Nepalese Commercial Banks, *Economic Journal of Development Issues* Vol. 19 & 20 No. 1-2, 22-38

- Budhijono, Fongnawati. (2021). Main Effects and Interaction Effects of Bank Ownership Types and Bank Core Capital Category to The Bank NPL Performance, *International Journal Of Business Studies*, Vol. 5 No 1, 39-50
- Djamil, Fathurrahman. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djatismiko, Budi ., Rachman, Dini Astrilia. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Non Performing Financing (NPF) (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia), *Study & Accounting Research*, Vol XII No 1, 1-9.
- Dwi Sakti, Andik., Anisykurlillah, Indah. (2017). Analysis of Factors Affecting Non Performing Loan on Cooperation, *Accounting Analysis Journal AAJ* 6 (3), 432-444.
- Elliyana, Ela ., Bachtiar, Irmah Halimah ., Ramadani, Dian Putri ., Benyahia Ahmed ., Rabia . (2020). Effect Of Financing To Deposit Ratio (Fdr) And Of Financing To Asset Ratio (Far) Against Non-Performing Financing (Npf) At The Branch Office Of Bank Rakyat Indonesia Syariah Makassar, *International Journal Of Business Education And Management Studies (Ijbems)*, Vol.5. Issue 2, 178-186.
- Fajar, Hanifan., Umanto. (2017). The impact of macroeconomic and bank specific factors toward non-performing loan: evidence from Indonesian public banks, *Banks and Bank Systems*, Volume 12, Issue 1, 67-74.
- Fathonah, A. S., & Hermawan, D. (2020). Estimasi Pengaruh Faktor Internal Bank dan Stabilitas Makroekonomi Terhadap Profitabilitas Dengan Mediasi Rasio Pembiayaan Bermasalah di Pt Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(2), 93–108.
- Ghozali, I. (2018) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. 9th edn. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat., Solikhul, Alaydrus, M.Z. and Bakri, M. (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship di BMT Se-Kota Jepara. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(01), pp.93-102.
- Hidayati, Meilani Lailatul., Hasanuh, Nanu. (2022). Pengaruh CAR dan FDR Terhadap NPF Pada Bank Syariah yang Terdaftar Di OJK Periode 2018-2020, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, VOLUME 8 NO 2.
- Islamoglu, Mehmet . (2015). The Effect of Macroeconomic Variables on Non-performing Loan Ratio of Publicly Traded Banks in Turkey, *Wseas Transactions On Business And Economics*, Volume 12.
- Karim, Adi Warman. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Kasmir. (2007). Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: Grafindo Persada.
- Kim Quoc Trung, Nguyen .(2019). Determinants Of Non-Performing Loan In Commercial Banks: Evidence In Vietnam, *Journal of Science and Technology*, Vol.37, 73-89.
- Kusmayadi, Dedi. (2017). Penilaian Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dengan Faktor CAMEL, UNSIL. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 12, No. 1, Januari – Juni 2017.
- Kusmayadi, D., Firmansyah, I., & Badruzaman, J. (2018). The Impact Of Macroeconomic On Nonperforming Loan: Comparison Study at Conventional and Islamic Banking. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(2), 59-82.
- Latief, A. G. (2019). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Ukuran Perusahaan, dan Efisiensi Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Universitas Pasundan.
- Lidyah, Rika. (2016). Dampak Inflasi, Bi Rate, Capital Adequacy Ratio (Car), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Nonperforming Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance*, 2(1), pp.1-19.
- Mahmoedin. (2004). Melacak Kredit Bermasalah. Jakarata : Pustaka Sinar Harapan.
- Malimi, Kilugala. (2017). The Influence of Capital Adequacy, Profitability, and Loan Growth on Non-Performing Loans a Case of Tanzanian Banking Sector, *International Journal of Economics, Business and Management Studies* Vol. 4, No. 1, 38-49.
- Mandasari, Jayanti. (2021). Pengaruh Return On Asset (ROA), Financing To Deposits Ratio (FDR) Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Syariah Di Indonesia, *Journal Of Accounting, Finance And Auditing*, Vol. 3 No. 1 (2021), 25-33.
- Nugrohowati, Rindang Nuri Isnaini., Bimo, Syafrildha. (2019). Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 5 No. 1, 43-49.
- Nuraliyah, Ghaniya Rizki. (2021). Faktor-faktor yang Memengaruhi Non Performing Finance (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2003-2019, *Journal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Volume 1, No. 2, Tahun 2021, Hal: 82-87.
- Nurlela, U., Fitri, L.E. and Ridhwan, R. (2023). Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Program Sahabat Ibu Di Bmt Al-Ishlah Kota Jambi. Mufakat: *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(4), pp.736-754.
- P. A. Anuradha. (2020). Factors Affecting Non-Performing Loan Portfolio in Micro-Lending: Evidence from Sri Lanka, *International Journal of Science and Research (IJSR)*, Volume 9 Issue 2, 1503-1507.

- Perdani, Putri., Maskudi., Sari, Risti Lia. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Tahun 2013-2018, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1,36-40.
- Purwaningtyas, Heny ., Hartono, Ulil. (2020). Pengaruh Gdp, Inflasi, Kurs, Car, Fdr, Financing Dan Bank Size Terhadap Npf Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2017, *Jurnal Ilmu Manajemen (Jim) Volume 8 Nomor 2*,352-367.
- Putra, A., & Syaichu, M. (2021). Analisis Pengaruh Bank Size, BOPO, FDR, CAR, Dan ROA Terhadap Non-Performing Financing (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016–2019). *Diponegoro Journal of Management*, 10(3)
- Rahmah, F.J., Pratami, L.N. and Setiawan, I. (2021). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(3), pp.661-676.
- Rehman, Ur Obaid. (2017). Determinants of Non-Performing Loan in South Asia: The Role of Financial Crisis, *Eurasian Journal of Business and Economics* 2017, 10(20), 105-124.
- Rezina, Sonia., Shaimom Chowdhury, Rubaiyat., Jahan, Nusrat. (2020). Non-Performing Loan in Bangladesh: A Comparative Study on the Islamic Banks and Conventional Banks, *Indian Journal of Finance and Banking*; Vol. 4, No. 1, 76-83.
- Riana Afliha E.K. dkk, (2017). Manajemen Risiko Pembiayaan Untuk Mengantisipasi Kondisi Financial Distress Pada Bank Syariah, *Journal of Islamic Economic Lariba*2017 vol.3, issue 2, 51-64.
- Rofi'ah, Khofidlotur ., A'yun, Alvira 'Aina. (2019). Faktor-Faktor Non-Performing Financing (NPF) di Bank Umum Syariah Indonesia, *Jurnal Ekonomi*/Volume XXIV, No. 03 November 2019: 452-467
- Salam, F. D. (2018). Pengawasan Pembiayaan Murābahah dan Implikasinya Terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Madani Sepanjang Taman Sidoarjo (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- S.Prasanth, P.Nivetha, M.Ramapriya, Dr. S.Sudhamathi, (2020), Factors Affecting Non Performing Loan In India, *International Journal Of Scientific & Technology Research* Volume 9, Issue 01, 1654-1657
- Safitri, Mairani., Ismawanto,Totok., Kusno.,Hendra Sanjaya. (2020). Pengaruh FDR dan BOPO terhadap NPF pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN, *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, Volume 16, Issue 3,201-207.

- Sanusi, M., Rahman, M. and Herianingrum, S., (2019). Analisis variabel makroekonomi terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 24(3), pp.335-349.
- Sugiharto, R. Bagus., Nuryartoro, Nunung ., Effendi, Jaenal. (2019). Determinan Non Performing Financing (Npf) Pada Segmen Business Banking (Studi Kasus Di Pt Bank Syariah X), *journal of management Review*, Volume 3 Number 1 Page (291-296).
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombiansi (Mixed Metods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suprianto, Edy, Setiawan, H., Rusdi, Dedi. (2020). Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Wahana Riset Akuntansi*, 8(2), 140-146.
- Sofyan, M., 2021, February. Kinerja BPR dan BPRS pada masa pandemik covid-19. In *Seminar Nasional ADPI Mengabdikan Untuk Negeri (Vol. 2, No. 1, pp. 6-12)*.
- Windasari, Tasya Feby ., Diatmika, I Putu Gede. (2021). Pengaruh Inflasi, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Skor Tukar Rupiah Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018, *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol : 12 No : 02,568-579.
- Yuniarti, N.,Astuti, B.,Ranidiah, F., 2022. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), pp.384-396.
- Bank Indonesia . (2024). Data BI rate. <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/BI-Rate.aspx>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992>
- Badan Pusat Statistik. (2024). <https://www.bps.go.id/id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024) <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/>